

27/2-15



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BALIKPAPAN**



Balikpapan , Februari 2015



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

KOTA BALIKPAPAN



Balikpapan , Februari 2015



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

BADAN PERBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

KOTA BALIKPAPAN



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat serta hidayah-NYA jualah kita dapat menyelesaikan penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan untuk tahun anggaran 2014 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat yang mengemban amanah dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Program Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkaitan langsung sebagai upaya memberdayakan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian jumlah penduduk adalah merupakan satu kesatuan program pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam lingkup kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bimbingan dan pembinaan yang telah diberikan dari pejabat pemerintah kota dan pihak - pihak lain serta dukungan dan kerjasamanya seluruh staf merupakan hal tak ternilai sehingga kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Namun demikian, dukungan dan bimbingan lebih lanjut dari semua pihak tetap kami harapkan guna perbaikan dan peningkatan mutu di masa yang akan datang.

Balikpapan, Februari 2014

Kepala BPMPPKB Kota Balikpapan



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat serta hidayah-NYA jalah kita dapat menyelesaikan penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan untuk tahun anggaran 2014 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat yang mengemban amanah dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Program Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkaitan langsung sebagai upaya memberdayakan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian jumlah penduduk adalah merupakan kesatuan program pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam lingkup kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bimbingan dan pembinaan yang telah diberikan dari pejabat pemerintah kota dan pihak - pihak lain serta dukungan dan kerjasamanya seluruh staf merupakan hal tak ternilai sehingga kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Namun demikian, dukungan dan bimbingan lebih lanjut dari semua pihak tetap kami harapkan guna perbaikan dan peningkatan mutu di masa yang akan datang.

Balikpapan, Februari 2014

Kepala BPPKB Kota Balikpapan



KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG**
- B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**
- C. ASPEK STRATEGIS**
- D. STRUKTUR ORGANISASI**

BAB II RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)**
 - 1. VISI DAN MISI**
 - 2. TUJUAN DAN SASARAN**
 - 3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**
- B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**
- C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA**
- B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN**

BAB IV PENUTUP

- A. KESIMPULAN**
- B. SARAN**

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- 1. SK INDIKATOR KINERJA UTAMA**
- 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014**
- 3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014**

З' БЕИСОКОВИ КИЕВТ'А ДАНИ 2014

З' БЕИСУИВ КИЕКТ'А ДАНИИВИ (ВКЛ) ДАНИ 2014

Г' СК ИНДИКАТОВ КИЕКТ'А ПЛАИВ

Г'АМЬИВАН - Г'АМЬИВАН

В' ЗУВАН

А' КЕЗИИЬИГ'АН

В'УВ IА БЕИП'ЛЬ

В' БЕИСОИСКОВ'АН УКЦИТАВИГ'ИЛ'УС КЕП'АНОВИ

А' БЕИСОИСКОВ'АН УКЦИТАВИГ'ИЛ'УС КИЕКТ'А

В'УВ III УКЦИТАВИГ'ИЛ'УС КИЕКТ'А

С' БЕИЕЛ'ОВ'АН КИЕКТ'А ДАНИ 2014

В' ИНДИКАТОВ КИЕКТ'А ПЛАИВ (ИКО)

З' З'ИВ'АТЕСИ Д'АН КЕВ'ПАК'АН

З' Д'ИП'АН Д'АН З'УЗ'ОВ'АН

Г' АИГИ Д'АН ИИГИ

А' БЕИС'АН З'ИВ'АТЕСИ (ВЕИЗ'ИВ'А)

В'УВ II БЕИСУ'АН З'ИВ'АТЕСИ Д'АН БЕИЕЛ'ОВ'АН КИЕКТ'А

Д' З'ИВ'ОК'ИЛ'ОК' ОКС'АН'ИЗ'АГИ

С' АЗ'БЕК З'ИВ'АТЕСИЗ

В' Д'ОС'АЗ БОКОК Д'АН ЕП'ИСГИ

А' Г'АЛ'АВ БЕИ'АК'АН'ОС

В'УВ I БЕИ'Д'АН'НО'Г'АН

ВЕИСК'УЗ'АН ЕК'С'ЕК'УШ'Е

Д'АВЕЛ'АК' ИГИ

К'АЛ'АВ БЕИ'С'АН'Л'АВ

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan ke arah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka Pemerintah mengeluarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan seluruh Instansi untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab perubahan paradigma tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan menyusun LAKIP Tahun 2014 sebagai bentuk evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tersusun dan ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2011 sampai dengan 2016.

Mengacu pada RENSTRA Tahun 2011 - 2016, untuk tahun 2014 terdapat 11 (sebelas) sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan, sebagai berikut :

1. Meningkatnya perekonomian keluarga.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program Keluarga Berencana.
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.
4. Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan .
5. Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna.
6. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan.
7. Meningkatnya kesadaran hukum kaum perempuan
8. Meningkatnya kesadaran masyarakat perlindungan anak
9. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (pegawai)
10. Terselenggaranya layanan administrasi perkantoran

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan ke arah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel yang berorientasi pada meningkatkan peran dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka Pemerintah mengeluarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab perubahan paradigma tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Badan Pembudayaan Masyarakat Pembudayaan Perencanaan dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan menyusun LAKIP Tahun 2014 sebagai bentuk evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah terumum dan ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2011 sampai dengan 2016.

Mengacu pada RENCANA TAHUN 2011 - 2016, untuk tahun 2014 terdapat 11 (sebelas) sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Pembudayaan Masyarakat Pembudayaan Perencanaan dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian keluarga.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam program Keluarga Berencana.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
4. Meningkatkan peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
5. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna.
6. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan.
7. Meningkatkan kesadaran hukum kaum perempuan.
8. Meningkatkan kesadaran masyarakat perindugan anak.
9. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (pegawai)
10. Terselenggaranya layanan administrasi pemerintahan.

Sementara itu untuk mengukur pencapaian kerjanya dengan menggunakan indikator kinerja utama di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, yaitu

1. Meningkatnya partisipasi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1 alasan ekonomi kelompok kegiatan UPPKS dengan kegiatan yaitu :

- Jumlah UPPKS yang terlatih
- Jumlah Produk UPPKS yang terjual
- Jumlah pengurus AKU yang terlatih

2.a Terpenuhinya masyarakat dalam ber- KB dengan kegiatan yaitu :

- Prevalensi PA / PUS
- Jumlah peserta KB Baru
- Pus yang ingin ber KB tapi tidak terlayani (Unmet need)
- Peningkatan cakupan peran pria dalam ber KB
- Prevalensi PA (gakin) / PUS
- Peningkatan kemandirian ber- KB
- Cakupan laporan pelayanan kontrasepsi / pengendalian lapangan
- RT Kelurahan, Kecamatan, memiliki data mikro keluarga
- Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat dalam ber -KB
- Jumlah ketersediaan obat kontrasepsi serta side effect
- Jumlah peserta KB yang terayomi
- Implat dan IUD (Intra Uteri Deases)
- Jumlah pelayanan KB pasca persalinan / keguguran

2.b Pengembangan Pusat pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja

- Jumlah PIK remaja
- Partisipasi remaja dalam kegiatan PIK
- Frekuensi penyuluhan / remaja terpapar informasi KB dan kespro

Sementara itu untuk mengukur pencapaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja utama di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yaitu

1. Meningkatnya partisipasi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I dalam ekonomi kelompok kegiatan UPKS dengan kegiatan yaitu :

- Jumlah UPKS yang terlatih
- Jumlah Produk UPKS yang terjual
- Jumlah pengurus AKU yang terlatih

2.a. Terpenuhinya masyarakat dalam ber-KB dengan kegiatan yaitu :

- Prevalensi PA \ PUS
- Jumlah peserta KB Baru
- Pn yang ingin ber KB tapi tidak terlayani (Unmet need)
- Peningkatan cakupan peran pria dalam ber KB
- Prevalensi PA (gakin) \ PUS
- Peningkatan kemandirian ber-KB
- Cakupan laporan bimbingan konsultasi \ pengendalian pasangan
- RT Keluarga, Kecamatan, memiliki data mikro keluarga
- Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat dalam ber-KB
- Jumlah ketersediaan obat kontrasepsi serta side effect
- Jumlah peserta KB yang terlayani
- Implan dan IUD (Intra Uteri Device)
- Jumlah pelayanan KB pasca persalinan \ keguguran

2.b. Pengembangan Pusat pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan

- Reproduksi Remaja
- Jumlah PIK remaja
- Partisipasi remaja dalam kegiatan PIK
- Efektivitas penyuluhan \ remaja terpapar informasi KB dan kespro

3. Cakupan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kelompok kegiatan dengan kegiatan yaitu :

- Rasio kelompok BKB per RT
- Cakupan anggota BKB per -KB
- Jumlah kelompok BKB yang memiliki APE
- Persentase BKB percontohan
- Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB
- Raio PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) 1 / Kelurahan
- Rasio PLKB atau PKB 1 petugas / Kelurahan
- Jumlah Institusi Masyarakat pengelola program KB aktif
- Jumlah pemenang tingkat Propinsi
- Jumlah pemenang tingkat Nasional

4 Meningkatkan cakupan peran serta masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan dengan kegiatan yaitu :

- Jumlah Mahasiswa KKN
- Prosentase Kelurahan yang menyusun profil

5 Meningkatkan kreativitas masyarakat dalam pengembangan tehnologi tepat guna

- jumlah hasil karya cipta tehnologi tepat guna
- Jumlah posyantek yang terbentuk
- Jumlah warung tehnologi yang terbentuk

6 Meningkatnya Partisipasi angkatan kerja perempuan dengan kegiatan yaitu :

- Angka melek huruf usia 15 tahun ke atas
- Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah
- Cakupan peran serta wanita dalam pengelolaan program pembangunan di lapangan dengan jumlah kader PKK Aktif
- Jumlah kader posyandu

3. Cakupan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kelompok kegiatan :

- dengan kegiatan yaitu :
- Rasio kelompok BKB per RT
- Cakupan anggota BKB per -KB
- Jumlah kelompok BKB yang memiliki APE
- Persentase BKB percontohan
- Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang per-KB
- Rasio PKKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) \

Kelurahan

- Rasio PLKB atau PKB I petugas \ Kelurahan
 - Jumlah instansi Masyarakat pengelola program KB aktif
 - Jumlah pemegang tingkat Propinsi
 - Jumlah pemegang tingkat Nasional
4. Meningkatnya cakupan peran serta masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan dengan kegiatan yaitu :

- Jumlah Mahasiswa KKN
- Persentase Kelurahan yang menyusun profil

5. Meningkatkan kreativitas masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna

- Jumlah hasil karya cipta teknologi tepat guna
- Jumlah posyantek yang terbentuk
- Jumlah warung teknologi yang terbentuk

6. Meningkatnya Partisipasi angkatan kerja perempuan dengan kegiatan yaitu :

- Angka melek huruf usia 15 tahun ke atas
- Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan
- Cakupan peran serta wanita dalam pengelolaan program pembangunan di lapangan dengan jumlah kader PKK Aktif
- Jumlah kader posyandu

- 7 Tersedianya rumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak (KDRT, Traffiking, dll) dengan kegiatan yaitu :
 - Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan PUG dan anak
 - Terbentuknya pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A)
 - Terbentuknya kader damping PKDRT
 - Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dan tindak kekerasan
- 8 Terbentuknya forum anak Tingkat Kota:
 - dengan terbentuknya forum anak tingkat Kecamatan.
 - terbentuknya taman cerdas
 - Meningkatnya kesejahteraan anak dengan tersedianya PMT-AS
- 9 Meningkatnya kinerja petugas lapangan penyuluh KB
 - Meningkatnya kinerja SDM aparatur
- 10 Meningkatnya kualitas layanan masyarakat

Dengan tersusunya LAKIP ini, diharapkan menjadi salah satu evaluasi guna meningkatkan peran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, guna mendukung terciptanya “ Good Governance “ atau Pemerintah yang Baik yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan yang bermutu.

7. Tersedianya rumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak (KDRP, Trafficking dll) dengan kegiatan yaitu :
- Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan PUG dan anak
 - Terpentuknya bentuk pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2P2A)
 - Terpentuknya kader damping PKDRP
 - Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dan tindak kekerasan
8. Terpentuknya forum anak tingkat Kota
- dengan terbentuknya forum anak tingkat Kecamatan
 - terbentuknya timan cerdas
 - Meningkatnya kompetensi anak dengan tersedianya PNT-AS
9. Meningkatnya kinerja petugas lapangan penyuluh KB
- Meningkatnya kinerja SDM aparatur
10. Meningkatnya kualitas layanan masyarakat

Dengan tersusunya LAKIP ini diharapkan menjadi salah satu evaluasi guna meningkatkan peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana guna mendukung terciptanya " Good Governance " atau pemerintah yang baik yang akhirnya bermula pada terlaksananya pelayanan yang bermutu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD merupakan lembaga penyelenggara pemerintahan yang pembentukannya melalui Peraturan Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi masing - masing yang secara khusus telah ditetapkan, demikian pula dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan adalah SKPD yang dibentuk mengemban amanah untuk melaksanakan program dan kegiatan menyangkut bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Sebagai pengemban amanah, BPMPPKB berkewajiban menyusun Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai perwujudan langkah untuk menguatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun ketiga untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, baik itu keberhasilan yang mampu diraih maupun kegagalan yang ditemui dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Dasar penyusunan LAKIP ini adalah Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 dengan melaksanakan pengukuran kinerja yang telah dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perjanjian kinerja tahun 2014 yang telah disepakati.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dasar pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan adalah Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD merupakan lembaga penyelenggara pemerintahan yang dibentuknya melalui Peraturan Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi masing - masing yang secara khusus telah ditetapkan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan Perompakan dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan adalah SKPD yang dibentuk untuk mengemban amanah melaksanakan program dan kegiatan masyarakat bidang pemberdayaan perompakan dan keluarga berencana.

Sebagai pelaksana amanah BKM/BKB berkewajiban menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan langkah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dalam bertanggung jawabkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun ketiga untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, baik itu keberhasilan yang mampu dinilai maupun kegagalan yang ditemui dalam bidang pemberdayaan masyarakat perompakan dan keluarga berencana.

Dasar penyusunan LAKIP ini adalah Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 55 Tahun 2014 dengan melaksanakan pengukuran kinerja yang telah dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perjanjian kinerja tahun 2014 yang telah ditetapkan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dasar pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perompakan dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan adalah Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah.

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan keluarga berencana dan pelebagaan keluarga kecil yang berkualitas menuju masyarakat yang mandiri.

2. Fungsi

Mengacu pada tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mengemban beberapa fungsi yaitu :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rancangan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dalam pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Pelaksanaan tugas teknis penunjang program pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Pelaksanaan pembinaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- g. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. Pelaksanaan pembinaan penataan dan pengaturan urusan rumah tangga Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

C. Aspek Strategis

Adapun aspek strategis yang berkenaan dengan pengembanan tugas - tugas dan fungsi tersebut di atas antara lain :

1. PROGRAM KELUARGA BERENCANA

- a. Menurunnya dukungan politis dan operasional dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Kependudukan dan KB di lapangan dalam era otonomi daerah.
- b. Masih rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB, dikarenakan KB dianggap bagian dari tanggung jawab istri (perempuan) dalam keluarga.
- c. Rendahnya kesertaan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), memperbesar peluang drop out
- d. Masih terjadinya kegagalan akseptor KB IUD, Implant (Susuk KB) dan Suntik.
- e. Belum optimalnya pelaksanaan program KB Jamkesmas dan KB Jampersal
- f. Belum optimalnya pembinaan terhadap peserta KB jangka pendek (Suntik, Pil, Kondom) , sehingga berpengaruh terhadap kelestarian ber KB dan terjadi kecenderungan Drop Out
- g. Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi dalam kegiatan operasional di lapangan
- h. Tingkat kemampuan Kader UPPKS / UP2K yang relatif masih rendah dalam pengembangan usaha dan pemanfaatan fasilitas kredit yang tersedia
- i. Belum maksimalnya peran Pengurus Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) sebagai lembaga koordinator / pembina Kelompok UPPKS / UP2K

- g. Pengkoordinasian pelaksanaan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan pemberdayaan masyarakat keluarga berencana dan keluarga sejahtera pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. Pelaksanaan pembinaan penataan dan pengaturan urusan rumah tangga Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

C. Aspek Strategis

Adapun aspek strategis yang berkenaan dengan pengembangan tugas - tugas dan fungsi tersebut di atas antara lain :

1. PROGRAM KELUAKA BERENCANA

- a. Merumuskan dukungan politik dan operasional dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Kependudukan dan KB di lapangan dalam era otonomi daerah.
- b. Masih rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB, dikarenakan KB dianggap bagian dari tanggung jawab istri (perempuan) dalam keluarga.
- c. Rendahnya kesertaan KB Metode Kontraspsi Jangka Panjang (MKJP) memperoleh peluang drop out
- d. Masih terjadinya kegagalan akseptor KB IUD, Implant (Sunk KB) dan Suntik.
- e. Belum optimalnya pelaksanaan program KB Jamkesmas dan KB Jampersal
- f. Belum optimalnya pembinaan terhadap peserta KB jangka pendek (Suntik, Pil, Kondom) , sehingga berpengaruh terhadap kelanjutan ber KB dan terjadi kecenderungan Drop Out
- g. Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi dalam kegiatan operasional di lapangan
- h. Tingkat kemampuan Kader UPKS \ UPZK yang relatif masih rendah dalam pengembangan usaha dan pemanfaatan fasilitas kredit yang tersedia
- i. Belum maksimalnya peran Pengurus Asosiasi Kelompok UPKS (AKU) sebagai lembaga koordinator \ pembina Kelompok UPKS \ UPZK

- j. Masih perlunya peningkatan dukungan dana pembinaan petugas pencatatan dan pelaporan, serta dana operasional Pendataan Keluarga

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a. Masih lemahnya peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan - kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan
- b. Program - program pemberdayaan masyarakat belum mengacu pada kearifan lokal

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

- a. Balikpapan Menuju Kota Layak Anak Tahun 2015
- b. Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- c. Terbentuknya Kader Damping KDRT
- d. Peningkatan peran Kader dalam menuju keluarga bahagia sejahtera

- 4
- i. Masalah pentingya peningkatan dukungan dana pembinaan belugas pencatatan dan pelaporan serta dana operasional Fondation Keluarga

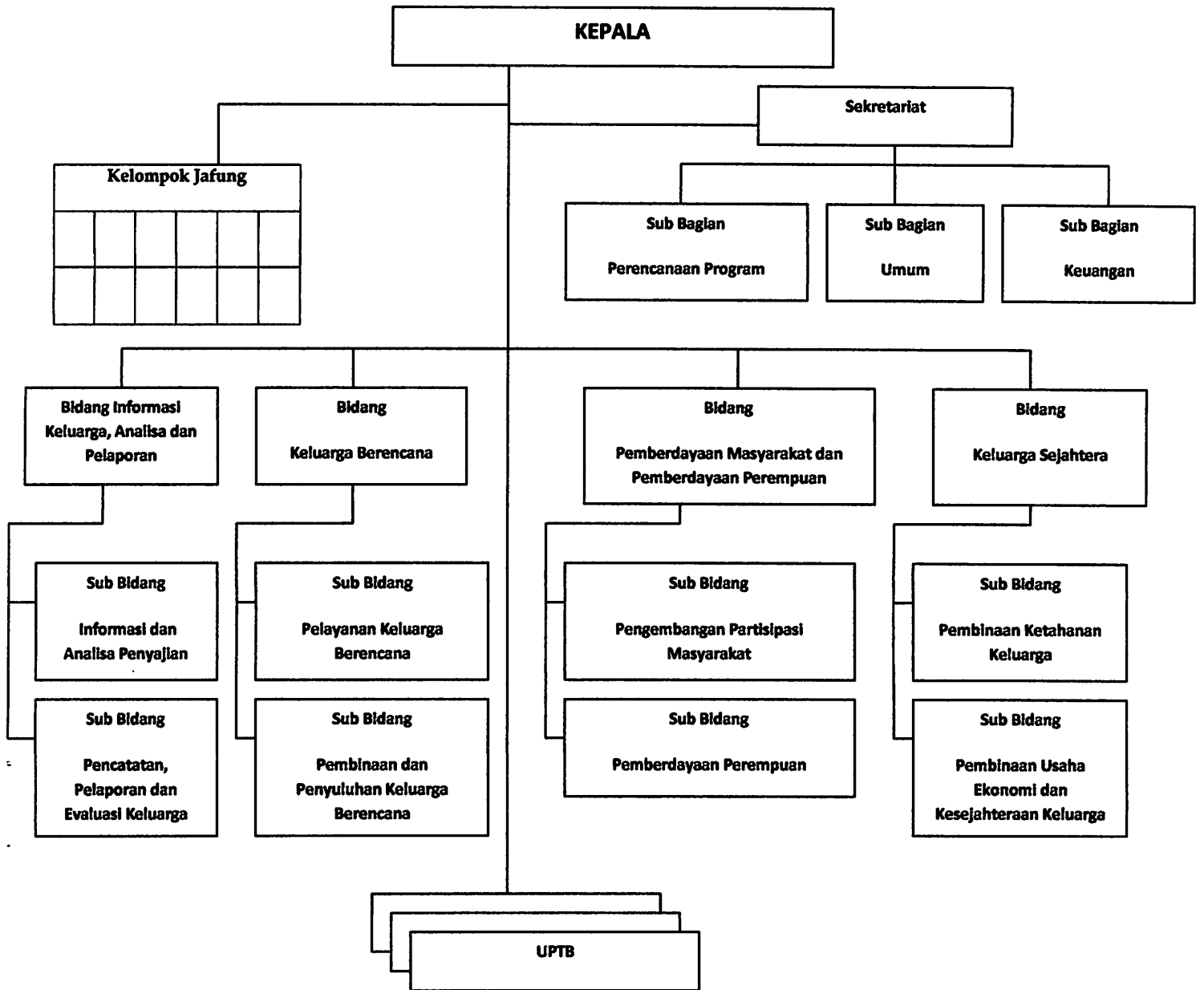
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a. Masalah lemahnya peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan - kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan
- b. Program - program pemberdayaan masyarakat belum mengacu pada kearifan lokal

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

- a. Balikpapan Menuju Kota Layak Anak Tahun 2015
- b. Tentukannya Pusat Belayanan Terpadu Peningkatan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- c. Tentukannya Kader Damping KDR
- d. Peningkatan peran Kader dalam menuju keluarga bahagia sejahtera

D. Struktur Organisasi



BAB II

RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

1. VISI DAN MISI

a. Visi

Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah memberdayakan masyarakat Balikpapan menuju keluarga berkualitas, bahagia dan sejahtera.

b. Misi

Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

b.1. Meningkatkan peran dan kesertaan masyarakat ber KB

b.2. Meningkatkan kegotong-royongan dalam memberdayakan masyarakat

b.3. Mendorong masyarakat kreatif dalam penciptaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna

b.4. Meningkatkan Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender

b.5. Meningkatkan perlindungan dan pengayoman anak

2. TUJUAN DAN SASARAN

a. TUJUAN

a.1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga

a.2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

a.3. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

a.4. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak

a.5. Meningkatkan sumber daya manusia dan aparatur

a.6. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja

b. SASARAN

b.1. Meningkatnya perekonomian keluarga, dengan indikator sarasanya :

- Meningkatnya Partisipasi Keluarga Pra Sejahtera dan KS Alasan Ekonomi dalam kelompok kegiatan UPPKS

- b.2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam Program Keluarga Berencana
 - Meningkatnya tingkat kesertaan untuk ber KB
 - Jaminan Askes pelayanan KB/KR
 - Pemahaman terhadap Kesehatan reproduksi
- b.3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
 - Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- b.4. Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
 - Meningkatnya tingkat partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan
- b.5. Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna
 - Meningkatnya tingkat kreativitas masyarakat dalam pengembangan TTG
- b.6. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan
 - Indeks pengarus utamaan gender Kota Balikpapan
- b.7. Meningkatnya kesadaran hukum kaum perempuan
 - Menurunnya kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga
- b.8. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan anak
 - Menurunnya tingkat kekerasan dan eksploitasi anak dibawah umur
 - Meningkatnya peran keluarga dalam perlindungan anak
 - Meningkatnya sarana dan prasarana publik untuk tumbuh kembang anak
 - Meningkatnya kesempatan anak untuk mengembangkan potensi diri
 - Meningkatnya Kesejahteraan anak
- b.9. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (pegawai)
 - Tingkat kinerja petugas lapangan / penyuluh KB
 - Cakupan usulan PAK
- b.10. Terselenggaranya layanan administrasi perkantoran.

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

a. STRATEGI

- a.1. Melakukan pembinaan dan peningkatan kemandirian dalam kesertaan masyarakat ber KB

- p.2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Program Keluarga Berencana
 - Meningkatkan tingkat kesadaran untuk ber KB
 - Jaminan Askes pelayanan KB/KR
 - Peningkatan terhadap Kesehatan reproduksi
 - p.3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
 - Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan
 - p.4. Meningkatkan peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
 - Meningkatkan tingkat partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan
 - p.5. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna
 - Meningkatkan tingkat kreativitas masyarakat dalam pengembangan
- TIG**
- p.6. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan
 - Indeks pengarus utamaan gender Kota Balikpapan
 - p.7. Meningkatkan kesadaran hukum kaum perempuan
 - Menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga
 - p.8. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan anak
 - Menurunkan tingkat kekerasan dan eksploitasi anak dibawah umur
 - Meningkatkan peran keluarga dalam perlindungan anak
 - Meningkatkan sarana dan prasarana publik untuk tumbuh kembang anak
 - Meningkatkan kesempatan anak untuk mengembangkan potensi diri
 - Meningkatkan kesejahteraan anak
 - p.9. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (pegawai)
 - Tingkat kinerja petugas lapangan \ penyuluh KB
 - Cakupan asuhan PAK
 - p.10. Terselenggaranya layanan administrasi perkawinan.

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

a. STRATEGI

- a.1. Melakukan pembinaan dan peningkatan kemandirian dalam kesadaran masyarakat ber KB

- a.2 Meningkatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan optimalisasi fungsi kelompok kegiatan yang ada seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
- a.3. Meningkatkan advokasi, promosi dan penggerakan masyarakat guna meningkatkan komitmen stakeholder serta peran sertamitra kerja dalam menekan laju pertumbuhan penduduk
- a.4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur
- a.5. Memfasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan program - program pemberdayaan masyarakat
- a.6. Pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam sekitar dengan pendirian Posyantekdes dan mengikuti Gelar TTG.
- a.7. Melakukan koordinasi lintas sektoral terkait sebagai mitra kerja dalam penanganan kasus - kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi.
- a.8. Memberdayakan perempuan dengan peningkatan kualitas hidup dan kemampuannya agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- a.9. Memfasilitasi upaya mewujudkan Balikpapan menuju Kota Layak Anak 2015

b. KEBIJAKAN

- b.1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk merencanakan kehidupan keluarganya
- b.2. Meningkatkan pembinaan dan tingkat kemandirian masyarakat dalam ber KB
- b.3. Meningkatkan pemahaman masyarakat untuk membina keluarga harmonis dan sejahtera
- b.4. Meningkatkan keswadayaan dan partisipasi masyarakat pembangunan

- a.2 Meningkatkan pembinaan keistiharan dan keajaiberaan keluarga dengan optimalisasi fungsi kelompok kegiatan yang ada seperti Bina Keluarga Balita (BKB) , Bina Keluarga Remaja (BKR) , Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
- a.3 Meningkatkan advokasi, promosi dan pergerakan masyarakat guna meningkatkan komitmen stakeholder serta peran serta mitra kerja dalam menekan laju pertumbuhan penduduk
- a.4 Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur
- a.5 Memfasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan program - program pemberdayaan masyarakat
- a.6 Pemasayarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam sekitar dengan pendirian Posyandekes dan mengikuti Gelar TIG.
- a.7 Melakukan koordinasi lintas sektoral terkait sebagai mitra kerja dalam penanganan kasus - kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi
- a.8 Menberdayakan perempuan dengan peningkatan kualitas hidup dan kemampuannya agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- a.9 Memfasilitasi upaya mewujudkan Balikpapan menuju Kota Layak

April 2017

p. KEBIJAKAN

- p.1 Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk merencanakan kehidupan keluarganya
- p.2 Meningkatkan pembinaan dan tingkat kemandirian masyarakat dalam ber KB
- p.3 Meningkatkan pembinaan masyarakat untuk membina keluarga harmonis dan sejahtera
- p.4 Meningkatkan keswadayaan dan partisipasi masyarakat pembangunan

- b.5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
- b.6. Meningkatkan peran aktif masyarakat untuk mengembangkan teknologi tepat guna menunjang kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi keluarga
- b.7. Meningkatkan peran aktif perempuan dalam pembangunan melalui akses yang lebih luas bagi perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan
- b.8. Memberikan perlindungan kepada kaum perempuan dan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan dan menyediakan ruang dan fasilitas yang layak bagi anak untuk mengembangkan bakat dan aktivitasnya
- b.9. Meningkatkan ketahanan fisik peserta didik SD/MI dalam mengikuti kegiatan
- b.10. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sebagai pengelola program.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja Utama yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur penilaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan adalah :

1. Meningkatnya partisipasi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1 alasan ekonomi kelompok kegiatan UPPKS dengan kegiatan yaitu :
 - Jumlah UPPKS yang terlatih
 - Jumlah Produk UPPKS yang terjual
 - Jumlah pengurus AKU yang terlatih
- 2.a Terpenuhinya masyarakat dalam ber- KB dengan kegiatan yaitu :
 - Prevalensi PA / PUS
 - Jumlah peserta KB Baru
 - Pus yang ingin ber KB tapi tidak terlayani (Unmet need)
 - Peningkatan cakupan peran pria dalam ber KB

- b.5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
- b.6. Meningkatkan peran aktif masyarakat untuk mengembangkan teknologi tepat guna menunjang kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi keluarga
- b.7. Meningkatkan peran aktif perempuan dalam pembangunan melalui akses yang lebih luas bagi perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan
- b.8. Meningkatkan perlindungan kepada kaum perempuan dan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan dan penyediaan ruang dan fasilitas yang layak bagi anak untuk mengembangkan bakat dan aktivitasnya
- b.9. Meningkatkan ketahanan fisik peserta didik SD\MI dalam mengikuti kegiatan
- b.10. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparaturnya sebagai pengelola program.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja Utama yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur penilaian kinerja badan Pembudayaan Masyarakat Berdaya dan Kemampuan dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan adalah :

- 1. Meningkatnya partisipasi keluarga praja-jahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi kelompok kegiatan UPRKS dengan kegiatan yaitu :
 - Jumlah UPRKS yang tertatih
 - Jumlah Produk UPRKS yang terjual
 - Jumlah pengurus AKU yang tertatih
- 2. Terpenuhinya masyarakat dalam ber-KB dengan kegiatan yaitu :
 - Prevalensi PA \ PUS
 - Jumlah peserta KB baru
 - Pas yang ingin ber KB tapi tidak tertayani (Unmet need)
 - Peningkatan cakupan peran pria dalam ber KB

- Prevalensi PA (gakin) / PUS
- Peningkatan kemandirian ber-KB
- Cakupan laporan pelayanan kontrasepsi / pengendalian lapangan
- RT Kelurahan, Kecamatan, memiliki data mikro keluarga
- Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat dalam ber-kB
- Jumlah ketersediaan obat kontrasepsi serta side effect
- Jumlah peserta KB yang terayomi
Implat dan IUD (Intra Uteri Deases)
- Jumlah pelayanan KB pasca persalinan / keguguran

2.b Pengembangan Pusat pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja

- Jumlah PIK remaja
- Partisipasi remaja dalam kegiatan PIK
- Frekuensi penyuluhan / remaja terpapar informasi KB dan kespro

3. Cakupan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kelompok kegiatan dengan kegiatan yaitu :

- Rasio kelompok BKB per RT
- Cakupan anggota BKB per -KB
- Jumlah kelompok BKB yang memiliki APE
- Persentase BKB percontohan
- Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB
- Raio PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) 1 / Kelurahan
- Rasio PLKB atau PKB 1 petugas / Kelurahan
- Jumlah Institusi Masyarakat pengelola program KB aktif
- Jumlah pemenang tingkat Propinsi
- Jumlah pemenang tingkat Nasional

4. Meningkatnya cakupan peran serta masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan dengan kegiatan yaitu :

- Jumlah Mahasiswa KKN
- Prosentase Kelurahan yang menyusun profil

- Penelitian PA (Purkin) \ PUS
 - Penelitian komanditer ber-KB
 - Cakupan laporan pelayanan kontrasepsi \ pengendalian kelahiran
 - RT Kelurahan Kecamatan, memiliki data milik keluarga
 - Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat dalam ber-KB
 - Jumlah ketersediaan obat kontrasepsi serta side effect
 - Jumlah peserta KB yang terlayani
 - Implan dan IUD (Intra Uteri Device)
 - Jumlah pelayanan KB pasca persalinan \ keguguran
- 3.b Pengembangan Pusat pelayanan informasi dan Konseling Kesehatan
- Reproduksi Remaja
 - Jumlah PIK remaja
 - Partisipasi remaja dalam kegiatan PIK
 - Efektifitas penyuluhan \ remaja terpapar informasi KB dan repro
3. Cakupan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kelompok kegiatan dengan kegiatan yaitu :
- Rasio kelompok BKB per RT
 - Cakupan anggota BKB per-KB
 - Jumlah kelompok BKB yang memiliki APE
 - Persentase BKB percontohan
 - Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB
 - Rasio PIKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) \ Kelurahan
 - Rasio PIKB atau PKB I petugas \ Kelurahan
 - Jumlah Instansi Masyarakat pengelola program KB aktif
 - Jumlah pemenang tingkat Propinsi
 - Jumlah pemenang tingkat Nasional
4. Meningkatkan cakupan peran serta masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan dengan kegiatan yaitu :
- Jumlah Mahasiswa KKN
 - Penelitian Kelurahan yang menyusun profil

5. Meningkatkan kreativitas masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna
 - jumlah hasil karya cipta teknologi tepat guna
 - Jumlah posyantek yang terbentuk
 - Jumlah warung teknologi yang terbentuk
6. Meningkatnya Partisipasi angkatan kerja perempuan dengan kegiatan yaitu :
 - Angka melek huruf usia 15 tahun ke atas
 - Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah
 - Cakupan peran serta wanita dalam pengelolaan program pembangunan di lapangan dengan jumlah kader PKK Aktif
 - Jumlah kader posyandu
7. Tersedianya rumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak (KDRT, Trafficking, dll) dengan kegiatan yaitu :
 - Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan PUG dan anak
 - Terbentuknya pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A)
 - Terbentuknya kader damping PKDRT
 - Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dan tindak kekerasan
8. Terbentuknya forum anak Tingkat Kota:
 - dengan terbentuknya forum anak tingkat Kecamatan.
 - terbentuknya taman cerdas
 - Meningkatnya kesejahteraan anak dengan tersedianya PMT-AS
9. Meningkatnya kinerja petugas lapangan penyuluh KB
 - Meningkatnya kinerja SDM aparatur
10. Meningkatnya kualitas layanan masyarakat

- 5. Meningkatkan kreativitas masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna
 - Jumlah hasil karya cipta teknologi tepat guna
 - Jumlah post-erek yang terbentuk
 - Jumlah warung teknologi yang terbentuk
- 6. Meningkatkan Partisipasi angkatan kerja perempuan dengan kegiatan yaitu :
 - Angka melok huruf usia 15 tahun ke atas
 - Partisipasi perempuan di lembaga kemahiran
 - Cakupan peran serta wanita dalam pengelolaan program pembangunan di lapangan dengan jumlah kader PKK Aktif
 - Jumlah kader penyandu
- 7. Tersedianya rumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak (KDRP, Traffiking, dll) dengan kegiatan yaitu :
 - Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelompok PUG dan anak
 - Terbentuknya pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A)
 - Terbentuknya kader dangping PKDRP
 - Realisasi penyelesaian berbagai perlindungan perempuan dan anak dan tindak kekerasan
- 8. Terbentuknya forum anak tingkat Kota:
 - dengan terbentuknya forum anak tingkat kecamatan.
 - terbentuknya forum cerdas
 - Meningkatnya kesejahteraan anak dengan tersedianya PALT-A2
- 9. Meningkatnya kinerja petugas lapangan penyuluh KB
 - Meningkatnya kinerja SDM aparatur
- 10. Meningkatnya kualitas layanan masyarakat

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan disepakati serta ditandatangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana dengan Walikota Balikpapan, Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

C. **RENTAPAN KINERJA TAHUN 2014**

Berencana Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga
Perempuan dan keluarga Berencana dengan Walikota Balikpapan, Rentapan Kinerja
ditanandatangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan
sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan disepakati serta

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (BPMPPKB)
KOTA BALIKPAPAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS (SESUAI RENSTRA SKPD 2011-2016)	INDIKATOR KINERJA (SESUAI RENSTRA SKPD 2011-2016)	TARGET 2014 (sesuai Renstra SKPD)	PROGRAM 2014	KEGIATAN 2014	TARGET KINERJA (sesuai DPA Tahun 2014	BESAR DANA (RP.)
1	Meningkatnya perekonomian keluarga	1. Meningkatnya Partisipasi Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 Alasan Ekonomi dalam POKTAN UPPKS :		1. Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	1. Pembinaan dan Gelar Dagang UPPKS	1 Paket	299.750.000
		a. Jumlah anggota UPPKS yang terlatih	150 Orang		2. Pembinaan Institusi Masyarakat dalam Program KB / KS secara Paripurna	55 Kegiatan , 605 Orang	842.745.000
		b. Terbina dan terlatihnya institusi masy dalam meningkatkan kesejahteraan & pemberdayaan keluarga	175 Orang		3. Pelaksanaan Harganas	1 Paket	147.950.000
		c. Jumlah produk UPPKS yang terjual	20 KLP			15 Kali	
		d. Jumlah Pengurus AKU yang terlatih	15 Orang				
					TOTAL		1.290.445.000

NO.	SASARAN STRATEGIS (SESUAI RENSTRA SKPD 2011-2016)	INDIKATOR KINERJA (SESUAI RENSTRA SKPD 2011-2016)	TARGET 2014 (sesuai Renstra SKPD)	PROGRAM 2014	KEGIATAN 2014	TARGET KINERJA (sesuai DPA Tahun 2014)	BESAR DANA (RP.)
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program KB	1. Terpenuhinya kebutuhan Masyarakat dalam ber-KB :		1. Keluarga Berencana (KB)	1. Pembinaan dokter / bidan praktek swasta	1 Kali	58.725.000
		a. Meningkatnya prevalensi Rate PA / PUS	75,00%		2. Penyuluhan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	2600 Orang	278.390.000
		b. Meningkatnya jumlah peserta KB Baru	18.700				
		c. Menurunnya jumlah PUS yang ingin ber-KB yang tidak terlayani (unmet need)	10099		3. Pelayanan KB bagi Keluarga Miskin	552 Akseptor	110.000.000
		d. Peningkatan cakupan peran pria dalam ber-KB	3,67 %		4. Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi KB	78.000 Akseptor 52 Klinik KB	443.195.000
		e. Meningkatnya Prevalensi PA (Gakin) / PUS	552				
		f. Peningkatan kemandirian ber-KB	53,279				
		g. Meningkatnya cakupan pelayanan kontrasepsi/pengendalian lapangan	255		5. Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Obat	90%	200.000.000
		h. Bertambahnya Jumlah RT, Kelurahan dan Kecamatan yg memiliki data mikro Keluarga	34 Kelurahan		Side Effect	205 Buah Alkon	
		j. cakupan penyediaan alat dan Obat obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat dalam ber-KB	12,85 %			1 Paket obat dan Gawat darurat medis karena KB	
		k. Jumlah ketersediaan alat dan obat kontrasepsi serta side effect	1 Paket				
					Total		1.090.310.000

NO	KETERANGAN (2010-2011)	KETERANGAN (2011-2012)	PROYEKSI 2011	REVISI 2011 (KORRIGIR)	INDUKATOR KEMERIAHAN (KORREKTIF 2011-2012)	REVISI 2011 (KORRIGIR)	PROYEKSI 2012 (RUMAH SAKIT)				
2	Membayar kewajiban pajak dan lain-lain	Kebijakan pemerintah pusat	1. Kebijakan pemerintah pusat	10000	Membayar kewajiban pajak dan lain-lain	10000	110000000				
3	Kebijakan pemerintah pusat	Kebijakan pemerintah pusat	Kebijakan pemerintah pusat	10000	Kebijakan pemerintah pusat	10000	110000000				
4	Kebijakan pemerintah pusat	Kebijakan pemerintah pusat	Kebijakan pemerintah pusat	10000	Kebijakan pemerintah pusat	10000	110000000				
5	Kebijakan pemerintah pusat	Kebijakan pemerintah pusat	Kebijakan pemerintah pusat	10000	Kebijakan pemerintah pusat	10000	110000000				
6	Kebijakan pemerintah pusat	Kebijakan pemerintah pusat	Kebijakan pemerintah pusat	10000	Kebijakan pemerintah pusat	10000	110000000				
7	Kebijakan pemerintah pusat	Kebijakan pemerintah pusat	Kebijakan pemerintah pusat	10000	Kebijakan pemerintah pusat	10000	110000000				
8	Kebijakan pemerintah pusat	Kebijakan pemerintah pusat	Kebijakan pemerintah pusat	10000	Kebijakan pemerintah pusat	10000	110000000				
9	Kebijakan pemerintah pusat	Kebijakan pemerintah pusat	Kebijakan pemerintah pusat	10000	Kebijakan pemerintah pusat	10000	110000000				
10	Kebijakan pemerintah pusat	Kebijakan pemerintah pusat	Kebijakan pemerintah pusat	10000	Kebijakan pemerintah pusat	10000	110000000				
Total											

NO	INDIKATOR KINERJA (SKPD 2011-2016)	INDIKATOR KINERJA (KEMENTERIAN KEKORPRIKID 2011-2016)	TARGET 2014 (sebelum SKPD)	PROGRAM 2014	KEGIATAN 2014	TARGET KINERJA (sebelum SKPD Tahun 2014)	INDIKATOR KINERJA (RIK)
		1. Peningkatan jumlah peserta KB yang terencana, terapan, dan terpadu	100%				
		- Peningkatan jumlah peserta KB	100%				
		2. Peningkatan jumlah KB yang terencana, terapan, dan terpadu	100%				
		3. Peningkatan jumlah KB yang terencana, terapan, dan terpadu	100%				
		4. Peningkatan jumlah KB yang terencana, terapan, dan terpadu	100%				
		5. Peningkatan jumlah KB yang terencana, terapan, dan terpadu	100%				
		6. Peningkatan jumlah KB yang terencana, terapan, dan terpadu	100%				
		7. Peningkatan jumlah KB yang terencana, terapan, dan terpadu	100%				
		8. Peningkatan jumlah KB yang terencana, terapan, dan terpadu	100%				
		9. Peningkatan jumlah KB yang terencana, terapan, dan terpadu	100%				
		10. Peningkatan jumlah KB yang terencana, terapan, dan terpadu	100%				
		11. Peningkatan jumlah KB yang terencana, terapan, dan terpadu	100%				
		12. Peningkatan jumlah KB yang terencana, terapan, dan terpadu	100%				
		13. Peningkatan jumlah KB yang terencana, terapan, dan terpadu	100%				
		14. Peningkatan jumlah KB yang terencana, terapan, dan terpadu	100%				
		15. Peningkatan jumlah KB yang terencana, terapan, dan terpadu	100%				
		16. Peningkatan jumlah KB yang terencana, terapan, dan terpadu	100%				
		17. Peningkatan jumlah KB yang terencana, terapan, dan terpadu	100%				
		18. Peningkatan jumlah KB yang terencana, terapan, dan terpadu	100%				
		19. Peningkatan jumlah KB yang terencana, terapan, dan terpadu	100%				
		20. Peningkatan jumlah KB yang terencana, terapan, dan terpadu	100%				

NO.	SASARAN STRATEGIS (SESUAI RENSTRA SKPD 2011-2016)	INDIKATOR KINERJA (SESUAI RENSTRA SKPD 2011-2016)	TARGET 2014 (sesuai Renstra SKPD)	PROGRAM 2014	KEGIATAN 2014	TARGET KINERJA (sesuai DPA Tahun 2014	BESAR DANA (RP.)	
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	1. Cakupan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kelompok kegiatan :		1. Pengembangan data / Informasi	1. Penyusunan profil PMPPKB	1 Paket	247.030.000	
		a. Meningkatnya rasio kelompok Bina keluarga Balita (BKB) per RT	55 klp		2. Pendataan dan pemantauan data keluarga dalam ber KB /KR /KS	1 Paket	735.965.000	
		b. Meningkatnya cakupan anggota BKB ber-KB 70 %	1960 Kljg		3. Pembinaan dan peningkatan kapasitas petugas pengeloan dan recording	100 Orang	67.820.000	
		c. Meningkatnya jumlah kelompok BKB yang memiliki APE	38 Klp		4. Publikasi dan dokumentasi pelaksanaan program KB, KS, dan PMPP	1 Paket	51.000.000	
		d. Meningkatnya prosentase BKB percontohan	6 Klp		5. Rakerda KB - KS	250 Orang	44.550.000	
		2. Pembinaan Institusi Masyarakat :						
		a. Meningkatnya cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yg ber KB 87 %	1,675					
		b. Meningkatnya rasio pembantu pembina KB Desa (PPKBD) 1 petugas per Kelurahan	34					
		c. Meningkatnya rasio petugas lapangan KB /penyuluh KB (PLKB/PKB) petugas kelurahan	41 orang		2. Peningkatan pemberdayaan Masyarakat	1. Bimtek kelompok masyarakat pengelola sarana dan prasarana dan kelurahan prima	34 Kelurahan	99.600.000
		d. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat pengelola program KB Aktif	1.447					
						Total		1.245.965.000

NO	SISTEM STRATEGIS (REKSTRASIPD 2011-2016)	TARGET KEGIATAN (REKSTRASIPD 2011-2016)	TARGET (Rencana Kerja SKPD)	PROGNOZA 2014	KEGIATAN 2014	TARGET KEGIATAN (Rencana DPA Tahun 2014)	BIAYA DIPA (Rp)
1	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan		1. Pengembangan	1. Pengembangan profil MATHIP	1. Profil	242.000.000
		b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan		2. Data Informasi	2. Pendidikan dan pembangunan dan informasi	1. Profil	
2	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	22 Rp		Jalan per KIB AR AKS		132.902.000
		b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan			Pendidikan dan kesehatan masyarakat	100.000.000	
		c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	1000 Rp		Peningkatan peran serta masyarakat	Peningkatan peran serta masyarakat	1.000.000
		d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan			Pendidikan dan pembangunan	1.000.000	
		e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan			Program LRT, RT, dan RW/P	21.000.000	
		f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	22 Rp		Rencana KIB - K2	250.000.000	
		g. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan					
		h. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	0 Rp				
		i. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan					
		j. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	1.000				
3	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan			Peningkatan pemberdayaan	1. Peningkatan pemberdayaan	93.000.000
		b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan			Program dan kegiatan dan kegiatan		
		c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan			Peningkatan pemberdayaan		
		d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan			Peningkatan pemberdayaan		
		e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan			Peningkatan pemberdayaan		
		f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan			Peningkatan pemberdayaan		
		g. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan			Peningkatan pemberdayaan		
		h. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan			Peningkatan pemberdayaan		
		i. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan			Peningkatan pemberdayaan		
		j. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan			Peningkatan pemberdayaan		
4	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	1.000				1.132.902.000
		b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan					

NO.	SASARAN STRATEGIS (SESUAI RENSTRA SKPD 2011-2016)	INDIKATOR KINERJA (SESUAI RENSTRA SKPD 2011-2016)	TARGET 2014 (sesuai Renstra SKPD)	PROGRAM 2014	KEGIATAN 2014	TARGET KINERJA (sesuai DPA Tahun 2014	BESAR DANA (RP.)
		d. Meningkatnya jumlah pemenang tingkat Propinsi untuk lomba institusi masyarakat	7	3. Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1. Partisipasi pemberdayaan Masyarakat melalui Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN)		148.181.700
		e. Meningkatnya jumlah pemenang tingkat Nasional untuk lomba institusi masyarakat	4				
					Total		148.181.700
4	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	1. Meningkatnya cakupan peran serta masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan :		1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	1. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota	34 Kelurahan, 6 Kecamatan	329.575.000
		a. Meningkatnya peran serta institusi perguruan tinggi dalam pembangunan daerah	170 mahasiswa		2. Penguatan peran PKK melalui fungsi kesekretariatan TP PKK Kota	6 Kecamatan	901.355.000
		b. Meningkatnya cakupan kelurahan yang menyusun profil	90%		3. Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan PMT-AS	3081 Orang	1.097.100.000
					4. Operasional Unit Pengaduan Masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan	1 Paket	74.900.000
					5. Penguatan peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja I	34 Kelurahan	165.695.000
					jumlah		2.568.625.000

NO	REKORD STRUKTUR (REKORD STRUKTUR NEMD 2011-2016)	REKORD STRUKTUR (REKORD STRUKTUR NEMD 2011-2016)	TARUHI 2011 (Sani DPA) Rencana NEMD	REKORD STRUKTUR 2014	REKORD STRUKTUR 2011	TARUHI REKORD STRUKTUR (Sani DPA) Tahun 2011	REKORD STRUKTUR (10%)
					Jumlah		1.860.000.000
					0. Pengadaan mesin P&K dalam hal Pembelian dan pemasangan modul	1 Paket	343.040.000
					Paket II		
					7. Pengadaan mesin P&K dalam hal Pembelian dan pemasangan modul	1 Paket	350.000.000
					Paket III		
					8. Pengadaan mesin P&K dalam hal Pembelian dan pemasangan modul	1 Paket	250.000.000
					Paket IV		
					1. Biaya pemusnahan Profil kebunahan Olahas Sistem	31.000.000	100.000.000
					Total		3.103.040.000

NO.	SASARAN STRATEGIS (SESUAI RENSTRA SKPD 2011-2016)	INDIKATOR KINERJA (SESUAI RENSTRA SKPD 2011-2016)	TARGET 2014 (sesuai Renstra SKPD)	PROGRAM 2014	KEGIATAN 2014	TARGET KINERJA (sesuai DPA Tahun 2014)	BESAR DANA (RP.)
5	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	1. Meningkatnya tingkat kreatifitas masyarakat dalam pengembangan TTG :		1. Pengembangan lembaga ekonomi Kelurahan	1. Pembinaan Tehnologi Tepat Guna	1 Paket	175.000.000
		a. Meningkatnya jumlah hasil karya cipta tehnologi tepat guna	20 jenis				
		b. Meningkatnya jumlah Posyantek yang terbentuk	5 Kelompok				
		c. Meningkatnya jumlah Warung tehnologi yang terbentuk	10 Kelompok				
					Total		175.000.000
6	Meningkatnya Peran Serta Perem- puan dalam pembangunan	1. Menurunnya Angka melek Huruf perempuan usia 15 tahun keatas	62,00%	1. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1. Pemberdayaan Posyandu	1 Paket	167.325.000
		2. Angka Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan	54,82%			41 Pokjanal	
		3. Meningkatnya jumlah kader PKK aktif	16364 kader				
		4. Meningkatnya jumlah kader posyandu	1412 kader			100 Kader	
					Total		167.325.000

NO.	SASARAN STRATEGIS (SESUAI RENSTRA SKPD 2011-2016)	INDIKATOR KINERJA (SESUAI RENSTRA SKPD 2011-2016)	TARGET 2014 (sesuai Renstra SKPD)	PROGRAM 2014	KEGIATAN 2014	TARGET KINERJA (sesuai DPA Tahun 2014)	BESAR DANA (RP.)
		2. Terbentuknya Forum Anak Tingkat Kecamatan	7	2. Keceriasan kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan			
		3. Terbentuknya Taman Cerdas	2		Total		310.825.000
		4. Cakupan anak sekolah penerima program PMT-AS	3,081				
9	Meningkatnya kualitas SDM (pegawai)	1. Meningkatnya kinerja Penyuluh KB	1 paket	1. Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	1. Pentaloka Penyuluhan KB Tingkat Kota	5 Hari	99.170.000
		2. Meningkatnya kinerja SDM aparatur	1 paket		2. Penilaian angka kredit	26 Orang	35.580.000
				2. Peningkatan disiplin Aparatur	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	60 Paket	30.425.000
					Total		165.175.000
10	Terselenggaranya layanan administrasi perkantoran	1. Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	1 Paket	1. Pelayanan administrasi perkantoran	1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3 Item	70.500.000
					2. Penyediaan jasa kebersihan kantor	27 macam	18.025.000
					3. Penyediaan Alat Tulis kantor	53 jenis	118.525.000
					jumlah		207.050.000

NO.	SASARAN STRATEGIS (SESUAI RENSTRA SKPD 2011-2016)	INDIKATOR KINERJA (SESUAI RENSTRA SKPD 2011-2016)	TARGET 2014 (sesuai Renstra SKPD)	PROGRAM 2014	KEGIATAN 2014	TARGET KINERJA (sesuai DPA Tahun 2014)	BESAR DANA (RP.)
					jumlah		207.050.000
					4. Penyediaan Barang, Cetak dan penggandaan	14 Jenis	84.025.000
					5. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundangan-undangan	2 macam	20.000.000
					6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	5 Macam	10.050.000
					7. Penyediaan makanan dan minuman	40 Orang	139.475.000
					8. Rapat - rapat koordinasi, konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	156 Orang	
					9. Penyediaan jasa administrasi tehnis perkantoran	15 Orang	180.000.000
					10. Rapat-rapat koordinasi konsultasi kedalam dan keluar daerah		498.800.000
				2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	11 Macam	72.000.000,00
					2. Pengadaan peralatan gedung kantor	5 Macam	163.461.900,00
					3. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1 Paket	43.650.000,00
					4. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	53 Buah	117.828.000,00
					5. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	1 Paket	55.025.000,00
					Total		1.591.364.900
				Jumlah Anggaran seluruh Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014			9.994.363.800

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun, dan dilakukan pengukuran kinerja, maka dapat digambarkan evaluasi capaian kinerja dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Perekonomian Keluarga

Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan program Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga yang operasionalnya didukung oleh kegiatan kegiatan :

- Pembinaan dan Gelar Dagang UPPKS
- Pembinaan Institusi Masyarakat dalam Program KB / KS secara paripurna
- Pelaksanaan Harganas

Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	%
Meningkatnya Perekonomian Keluarga	Meningkatnya Partisipasi keluarga Pra Sejahtera dan KS I alasan ekonomi dalam Poktan UPPKS	749	236	31,51
	Jumlah anggota UPPKS yang terlatih	150	120	80
	Terbina dan terlatihnya institusi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga	175	135	77,14
	Jumlah produk UPPKS yang terjual	20	25	125
	Jumlah Pengurus AKU yang terlatih	15	4	26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun, dan dilakukan pengukuran kinerja, maka dapat dipaparkan evaluasi capaian kinerja dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perkonomian Keluarga

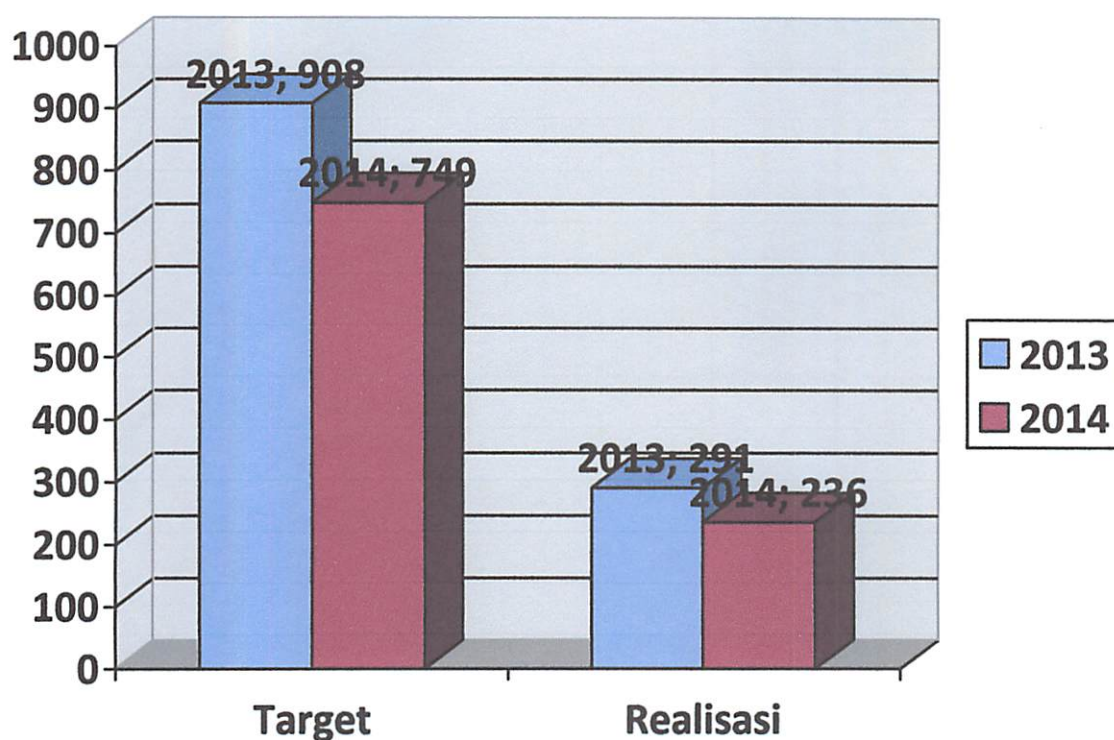
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan program Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga yang operasionalnya didukung oleh kegiatan :

- Pembinaan dan Gelar Dagang UPKS
- Pembinaan Instansi Masyarakat dalam Program KB \ K2 secara paripurna
- Pelaksanaan kegiatan

Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET 2014	Realisasi 2014	%
Meningkatnya Perkonomian Keluarga	Meningkatnya Partisipasi keluarga Pra Sejahtera dan K21 alasan ekonomi dalam Poktan UPKS	740	236	31,89
	Jumlah anggota UPKS yang terlatih	170	120	80
	Terbina dan terlatihnya instansi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan keluarga	172	132	77,14
	Jumlah produk UPKS yang terjual	20	22	122
	Jumlah Pengurus AKU yang terlatih	15	4	20

Hasil pencapaian yang tercantum dalam tabel diatas menunjukkan bahwa partisipasi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera dalam meningkatkan ekonomi keluarga yang terbentuk dalam satu wadah kegiatan UPPKS masih sangat rendah sehingga, kegiatan tersebut belum memberikan kontribusi dalam meningkatkan tahapan kesejahteraan keluarga Pra Sejahtera dan KS I terlihat dari tabel dengan realiasi 31.50 % . sedangkan produk dari UPPKS sudah menunjukan kreatif yang cukup tinggi dilihat dari hasil yang terjual sudah melampaui target dimana target 20 produk realisasinya mendapat 125 % hal ini masih perlu adanya pembinaan dan dukungan operasional serta pelatihan .



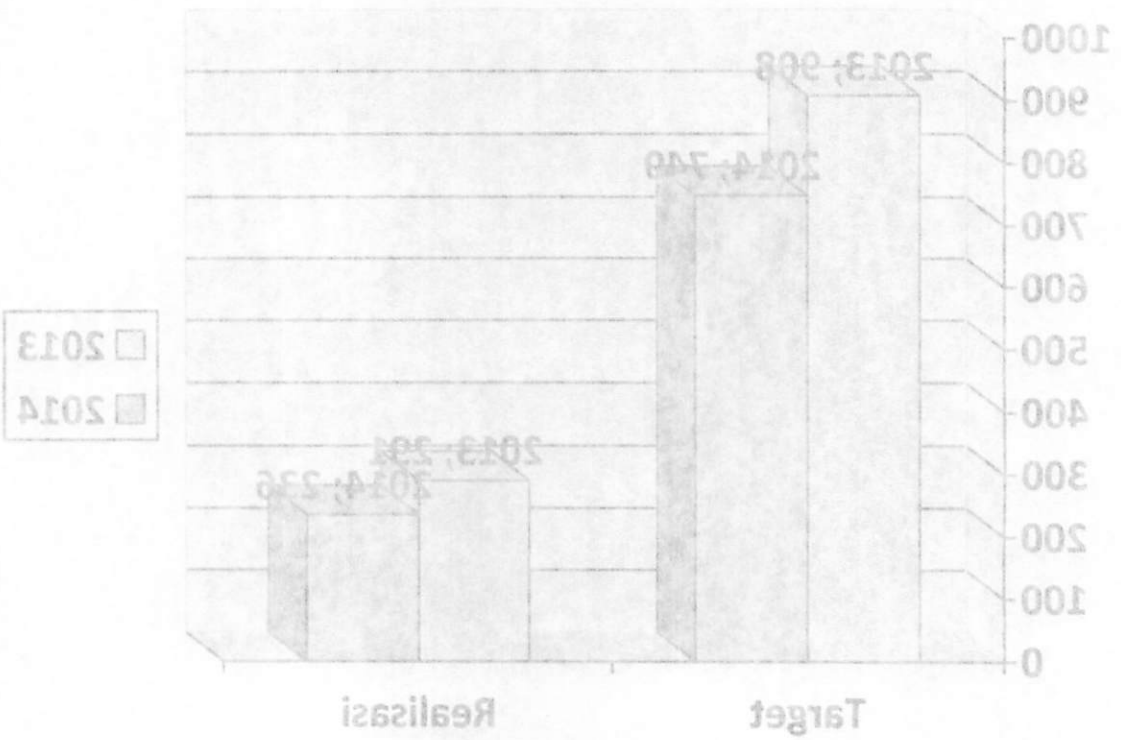
Grafik. Partisipasi Keluarga Pra Sejahtera dan KS I

2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Program Keluarga Berencana.

2.a. Terpenuhi kebutuhan masyarakat dalam ber-KB Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan program Pembinaan Keluarga Berencana yang operasionalnya didukung oleh berbagai kegiatan - kegiatan yaitu :

- Pelayanan KB Gakin
- Penyuluhan Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi
- Pembinaan Dokter / Bidan Praktek Swasta

Hasil pencapaian yang tercantum dalam tabel diatas menunjukkan bahwa partisipasi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera dalam meningkatkan ekonomi keluarga yang terbentuk dalam satu wadah kegiatan UPPKS masih sangat rendah sehingga kegiatan tersebut belum memberikan kontribusi dalam meningkatkan lapangan kesjahteraan keluarga Pra Sejahtera dan KSI terlihat dari tabel dengan realisasi 31,50 % . sedangkan produk dari UPPKS sudah menunjukkan kreatif yang cukup tinggi dilihat dari hasil yang terjual sudah melampaui target dimana target 20 produk realisasinya mendapat 125 % hal ini masih perlu adanya pembinaan dan dukungan operasional serta pelatihan .



Grafik Partisipasi Keluarga Pra Sejahtera dan KSI

2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Program Keluarga Berencana.
- 2.a. Terpenuhi kebutuhan masyarakat dalam ber-KB Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan program Pembinaan Keluarga Berencana yang operasionalnya didukung oleh berbagai kegiatan - kegiatan yaitu :
 - Pelayanan KB Gakin
 - Penyuluhan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi
 - Pembinaan Dokter \ Bidan Praktek Swasta

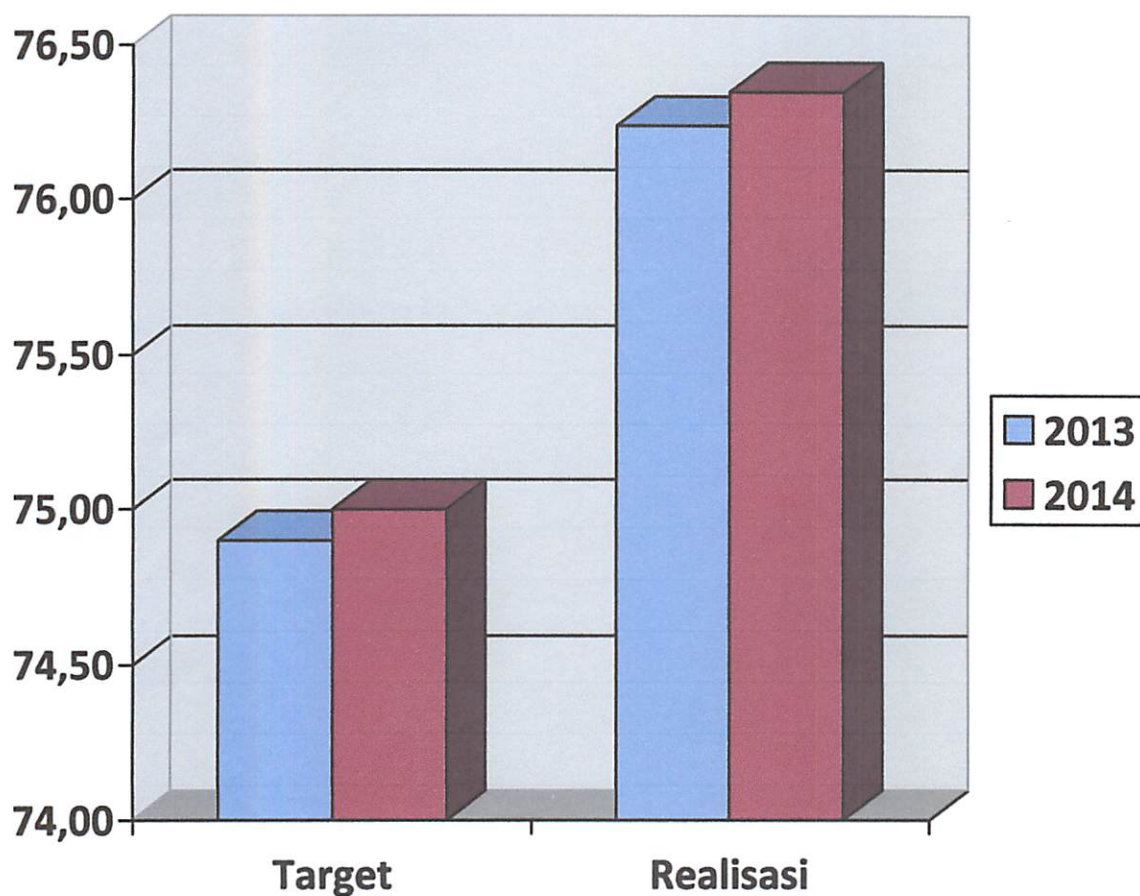
- Rakerda KB Kota Balikpapan
- Pelayanan pemasangan alat kontrasepsi KB
- Pengadaan alat kontrasepsi dan obat Side Effect

Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	%
Meningkatnya Kesadaran masyarakat dalam KB	1. Prevalensi PA/PUS	75	76,35	101,8
	2. Jumlah Peserta KB Baru	8.480	8.853	104,40
	3. PUS yang ingin ber KB yang Tidak terlayani (unmet need)	103.582	11.871	11,46
	4. Peningkatan cakupan peran Pria dalam ber KB	434	194	44,70
	5. Prevalensi PA (Gakin) / PUS	690	1134	164,35
	6. Peningkatan Kemandirian ber KB	82.040	50.716	61,82
	7. Cakupan Laporan Pelayanan Kontrasepsi/Pengendalian Lapangan	187	113	60
	8. RT, Kelurahan, Kecamatan	34	34	100,00
	9. Jumlah ketersediaan alat dan obat kontrasepsi serta side effect	42	27.01	64,30
	10. Jumlah peserta KB yang terayomi			
	- IMP	940	476	50,64
- IUD	2527	1863	73,72	
11. Tingkat Kelestarian ber KB				
- 10 tahun	10.977	12.350	112,51	
- 15 tahun	4.724	5.921	125,34	
- 20 tahun	725	891	122,90	

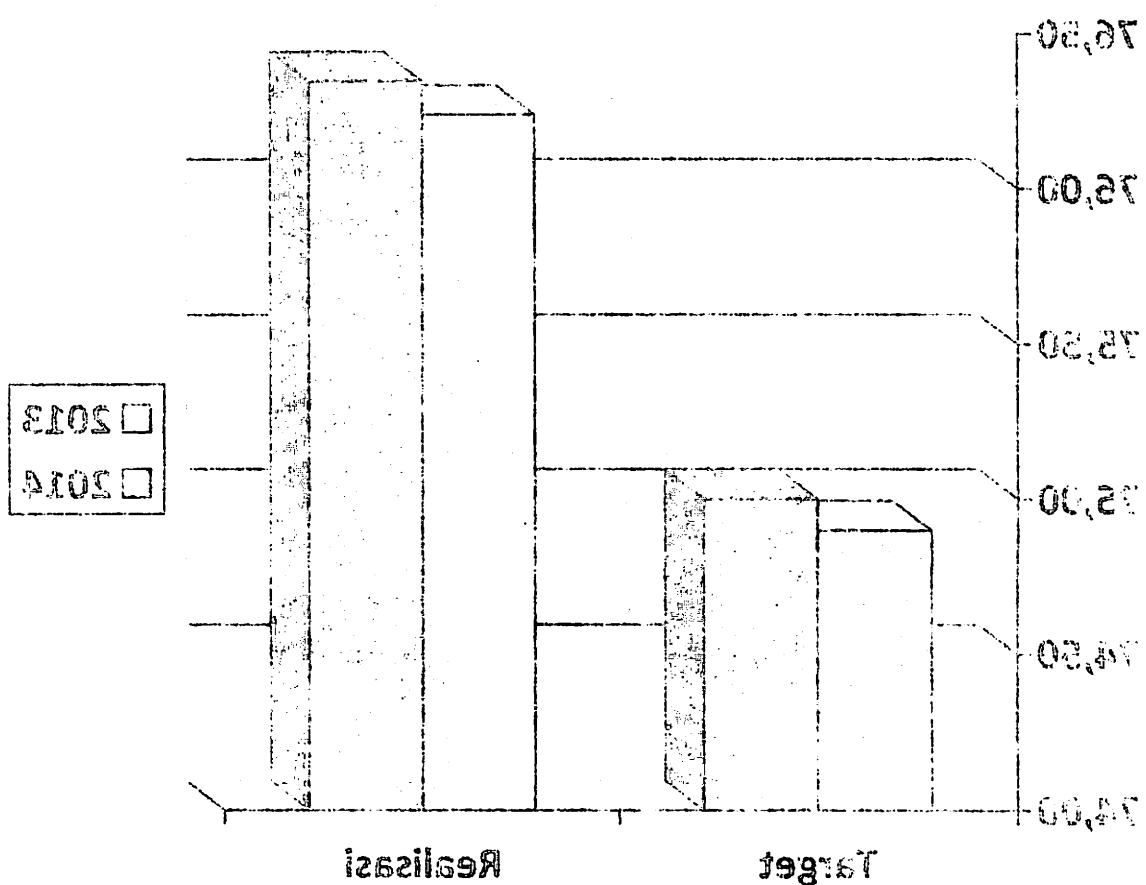
Hasil pencapaian yang tercantum pada tabel diatas prevalensi Rate KB mencapai 76,35 % sedangkan target Nasional sebesar 65 %, sehingga capaian ini sudah melebihi target dengan realisasi 117,46 % .

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dari masyarakat akan ber KB (untuk merencanakan keluarga sejahtera) sudah cukup baik (meningkat)serta hasil capaian secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik untuk itu diharapkan tingkat ekonomi keluarga juga lebih meningkat kecuali peran pria dalam kesertaan ber KB masih sangat rendah hal ini menunjukkan tingkat kesadaran peran pria dalam partisipasi akan ber KB masih kurang untuk itu perlu adanya pembinaan kelompok KB pria dan dukungan dari berbagai pihak baik dari Pemerintah maupun Tokoh Agama.



Grafik 2.1 Tingkat Kesertaan Ber KB

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dari masyarakat akan ber KB (untuk menanggulangi keluarga sejahtera) sudah cukup baik (meningkat) serta hasil capaian secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik untuk itu diharapkan tingkat ekonomi keluarga juga lebih meningkat kecuali peran pria dalam kesadaran ber KB masih sangat rendah hal ini menunjukkan tingkat kesadaran peran pria dalam partisipasi akan ber KB masih kurang untuk itu perlu adanya pembinaan kelompok KB pria dan dukungan dari berbagai pihak baik dari Pemerintah maupun Tokoh Agama.



Grafik 3.1 Tingkat Kesadaran Ber KB

2.b Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kesehatan reproduksi (Kespro) untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan program Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja yang operasionalnya didukung oleh kegiatan - kegiatan yang tergabung dalam program kegiatan penyuluhan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi:

Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	%
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Thd Kesehatan Reproduksi	Jumlah PIK Remaja	20	35	175
	Partisipasi remaja dalam kegiatan Pusat Informasi dan Konseling (PIK)	25	35	140
	Frekuensi Penyuluhan/remaja Terpapar informasi KB dan Kespro	10	10	100

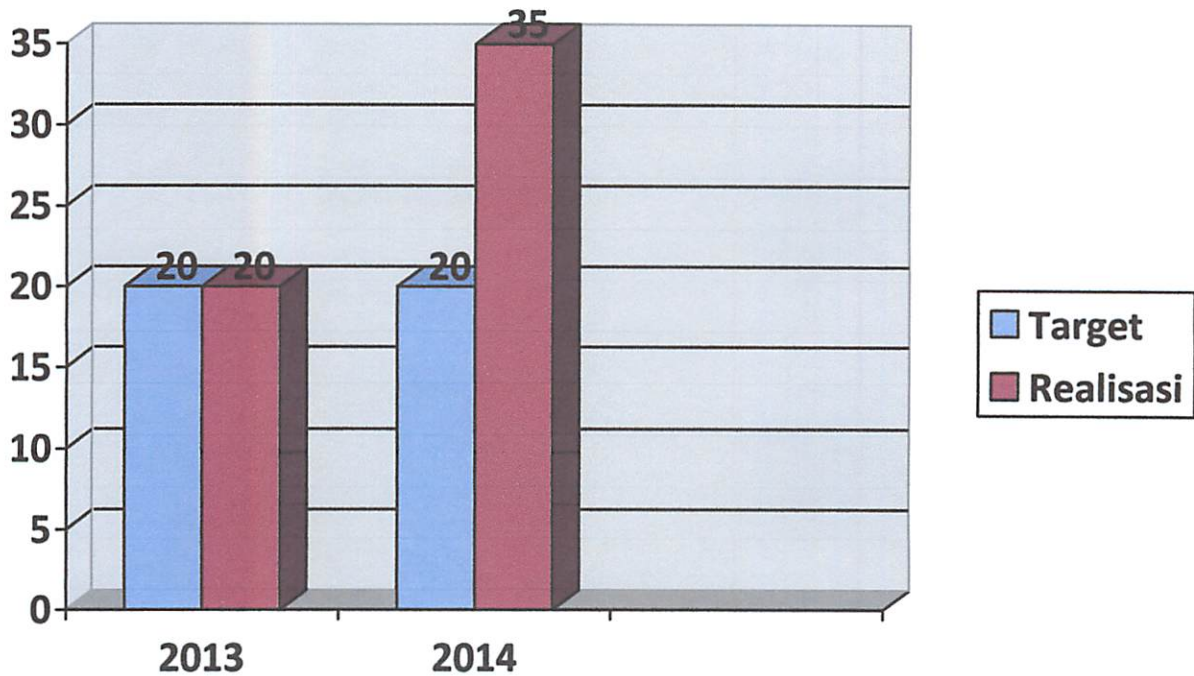
Dari tabel di atas, terlihat masih kecilnya remaja yang terpapar informasi masalah Kesehatan reproduksi, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius baik dari pemerintah orang tua dan lintas sektor terkait , mengingat di era yang globalisasi dan kemajuan teknologi , informasi apapun dapat dengan mudah di akses, dan dapat menjurumuskan pada hal - hal yang negatif.

3.3. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Kesehatan Reproduksi (Kepro) untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja yang operasionalnya didukung oleh kegiatan - kegiatan yang terdapat dalam program kegiatan penyuluhan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi:

Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET 2014	Realisasi 2014	%
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap	Jumlah PK Remaja	20	35	175
	Partisipasi remaja dalam kegiatan Pusat Informasi dan Konseling (PIK)	25	35	140
Terdapat informasi KB dan Kepro	Frekuensi Penyuluhan/remaja	10	10	100

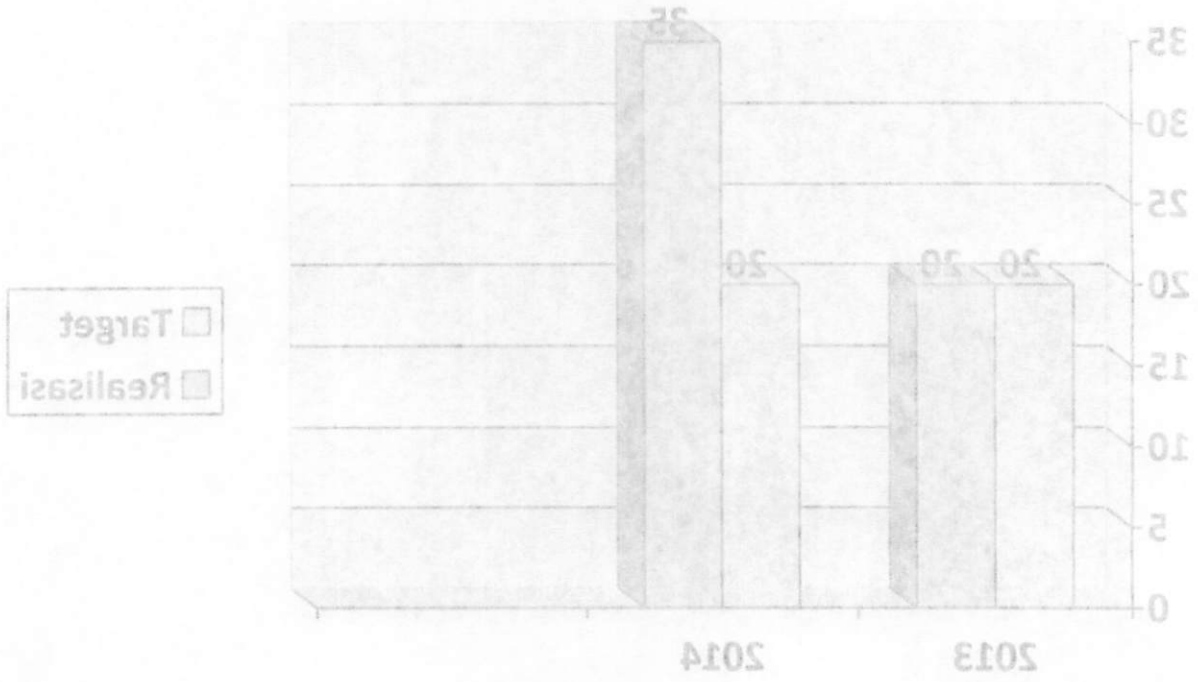
Dari tabel di atas terlihat masih kecilnya remaja yang terpapar informasi masalah kesehatan reproduksi sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius baik dari pemerintah orang tua dan lintas sektor terkait, mengingat di era yang globalisasi dan kemajuan teknologi, informasi apapun dapat dengan mudah di akses dan dapat menurunkan pada hal - hal yang negatif.



3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan beberapa program yaitu :

- a. Program Pengembangan data / informasi yang operasionalnya di dukung oleh kegiatan - kegiatan :
 - Pendataan dan pemantauan data keluarga dalam ber KB / KR / KS.
 - Pembinaan dan Peningkatan kapasitas petugas pengelolaan dan recording
 - Publikasi dan dokumentasi pelaksanaan program KB, KS, dan PMPP
 - Penyusunan profil PMPPKB
- b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang operasionalnya didukung oleh kegiatan :
 - Pembinaan teknologi kelompok masyarakat pengelola sarana dan prasarana dan kelurahan prima
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang operasionalnya didukung oleh kegiatan :
 - Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN)



3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan beberapa program yaitu :
- Program Pengembangan data \ informasi yang operasionalnya di dukung oleh kegiatan - kegiatan :
 - Pendataan dan pemantauan data keluarga dalam per KB \ KR \ KS.
 - Pembinaan dan Peningkatan kapasitas petugas pengelolaan dan recording
 - Publikasi dan dokumentasi pelaksanaan program KB, KS, dan PMP
 - Penyusunan profil PMPKB
 - Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang operasionalnya didukung oleh kegiatan :
 - Pembinaan teknologi kelompok masyarakat pengelola sarana dan prasarana dan keluarga prima
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang operasionalnya didukung oleh kegiatan :
 - Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut :

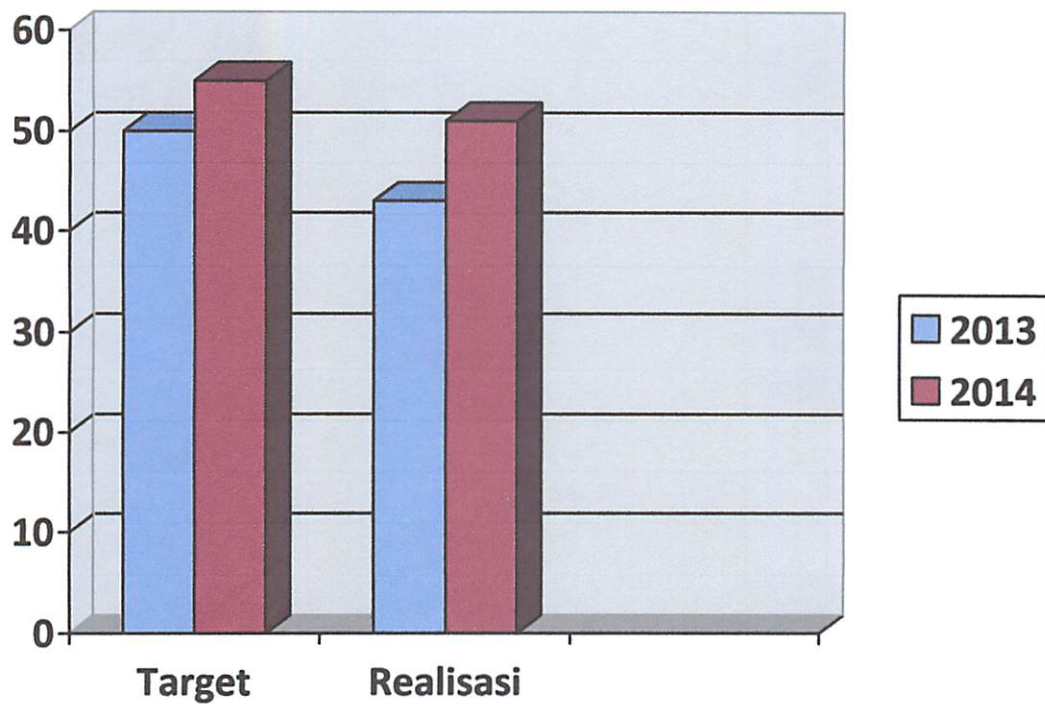
Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	%
Meningkatnya	Rasio Kelompok Bina Keluarga Balita per RT	55	51	92,73
Peran serta	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	1,960	1496	76,33
Masyarakat	Ber KB			
Dalam	Jumlah Kelompok BKB yang memiliki APE	38	51	134,21
Pembangunan	Prosentase Bina Keluarga Balita Percontohan	6	6	100
	Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB	1.675	573	34,21
	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) 1 petugas per kelurahan	34/34	34/34	100
	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 petugas per Kelurahan	34/34	26	76,47
	Jumlah institusi masyarakat pengelola program KB Aktif	1.447	2246	155,22
	- Jumlah pemenang Tingkat Provinsi	7	8	114,28
	- Jumlah pemenang Tingkat Nasional	4	1	25

Hasil Pencapaian yang tercantum dalam tabel tersebut diatas rata rata dari indikator kinerja dengan didukung dari program yang terlaksana pada kegiatan - kegiatan sehingga menunjukkan dari target yang ditentukan mencapai hasil yang cukup baik dalam hal ini tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan cukup tinggi maka perlu adanya dorongan dari Pihak terkait untuk mempertahankan kegiatan yang secara rutin serta lebih meningkat tingkat kreativitasnya sehingga dapat tercapai untuk jumlah pemenang tingkat nasional.

Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	%
Meningkatnya peran serta masyarakat	Rasio Kelompok Bina Keluarga Balita per RT	35	51	92,73
	Capaian Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) BerKS	1.900	1496	78,73
Dalam pembangunan	Jumlah Kelompok BKB yang memiliki APD	38	51	134,21
	Prosentase Bina Keluarga Balita Franchising	6	6	100
	Capaian FUS peserta KB anggota UPKS yang per KB	1.675	573	34,21
	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PKBD) 1 petugas per kelurahan	34\34	34\34	100
	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana Penyuluh KB (PKB/PKB) 1 petugas per Kelurahan	34\34	36	76,47
	Jumlah instansi masyarakat pengelola program KB Aktif	1.447	2246	155,22
	- Jumlah pemang tingkat Provinsi	7	8	114,28
	- Jumlah pemang tingkat Nasional	1	1	100

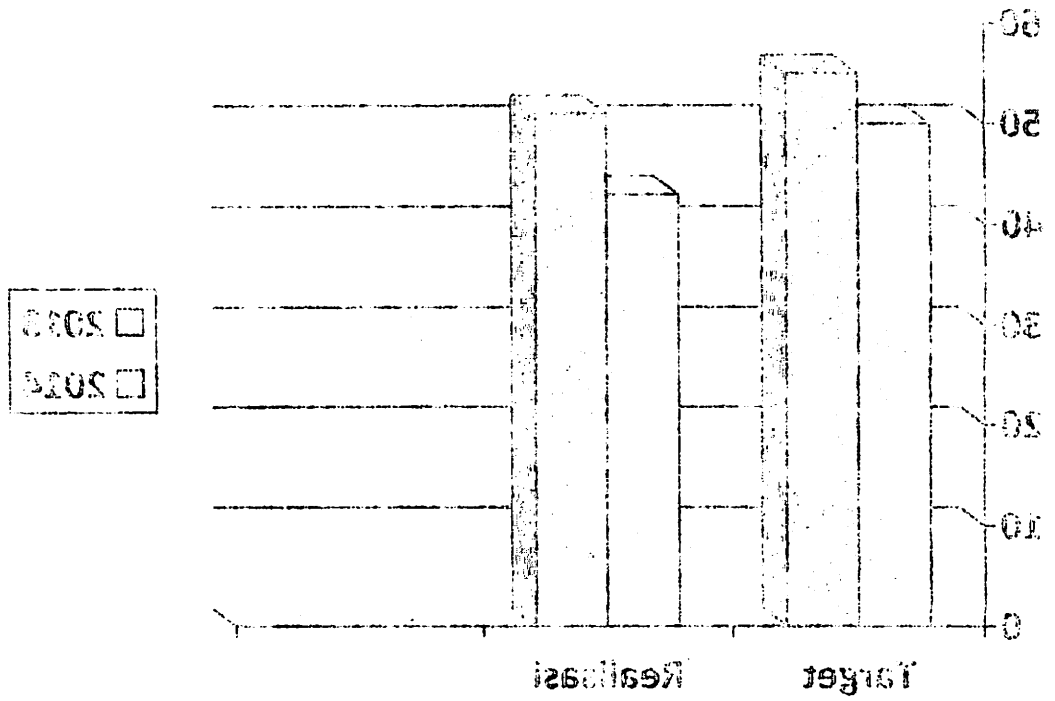
Hasil Pencapaian yang tercantum dalam tabel diatas rata rata dari indikator kinerja dengan dibantu dari program yang terlaksana pada kegiatan - kegiatan sehingga menunjukkan dari target yang ditentukan mencapai hasil yang cukup baik dalam hal ini tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan cukup tinggi maka perlu adanya dorongan dari Pihak terkait untuk mempertahankan kegiatan yang secara rutin serta lebih meningkatkan tingkat kreativitasnya sehingga dapat tercapai untuk jumlah pemang tingkat nasional.



4. Meningkatnya Peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan beberapa program yaitu :

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan yang operasionalnya didukung oleh kegiatan - kegiatan :
 - Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota
 - Penguatan Peran PKK melalui fungsi klesekretariat TP PKK Kota
 - Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan PMT-AS
 - Operasional Unit pengaduan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan
 - Penguatan peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja I
 - Penguatan peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja II
 - Penguatan peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja III
 - Penguatan peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja IV
- b. Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Kecamatan / Kelurahan yang operasionalnya didukung oleh kegiatan :
 - Bimbingan Teknis penyusunan profil Kelurahan Online Sistem.

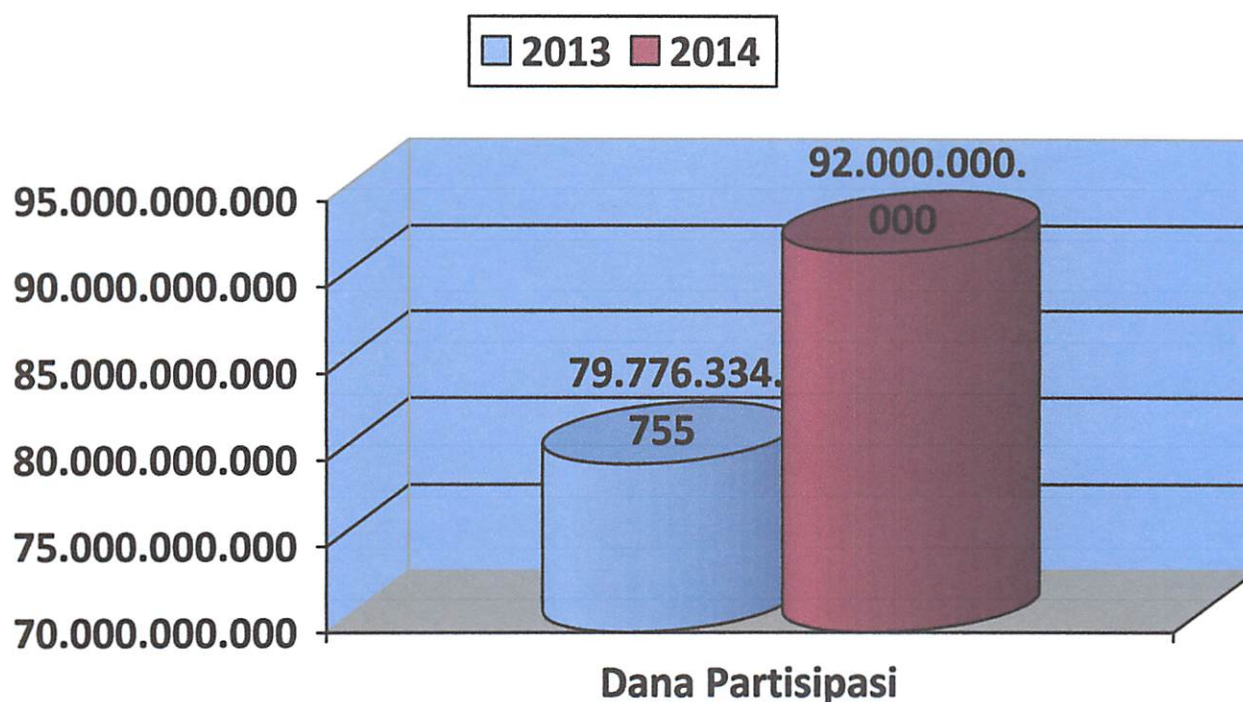


- 4. Meningkatkan peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
 - a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan yang operasionalnya didukung oleh kegiatan :
 - Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota
 - Penguatan peran PKK melalui fungsi klasifikasi di TP PKK Kota
 - Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan PMT-A2
 - Operasional Unit pengaduan masyarakat dalam penanganan komplain
 - Penguatan peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja I
 - Penguatan peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja II
 - Penguatan peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja III
 - Penguatan peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja IV
 - b. Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Kecamatan / Kelurahan yang operasionalnya didukung oleh kegiatan :
 - Bimbingan teknis penyusunan profil Kelurahan Online Sistem

Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	%
Meningkatnya peran serta	Jumlah Mahasiswa KKN	170	272	160
Lembaga Kemasyarakatan Dalam	Jumlah dana Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	79.776.334.755	92.000.000.000	115,32
Pembangunan	Prosentase Kelurahan yang menyusun profil	90%	100%	111,11

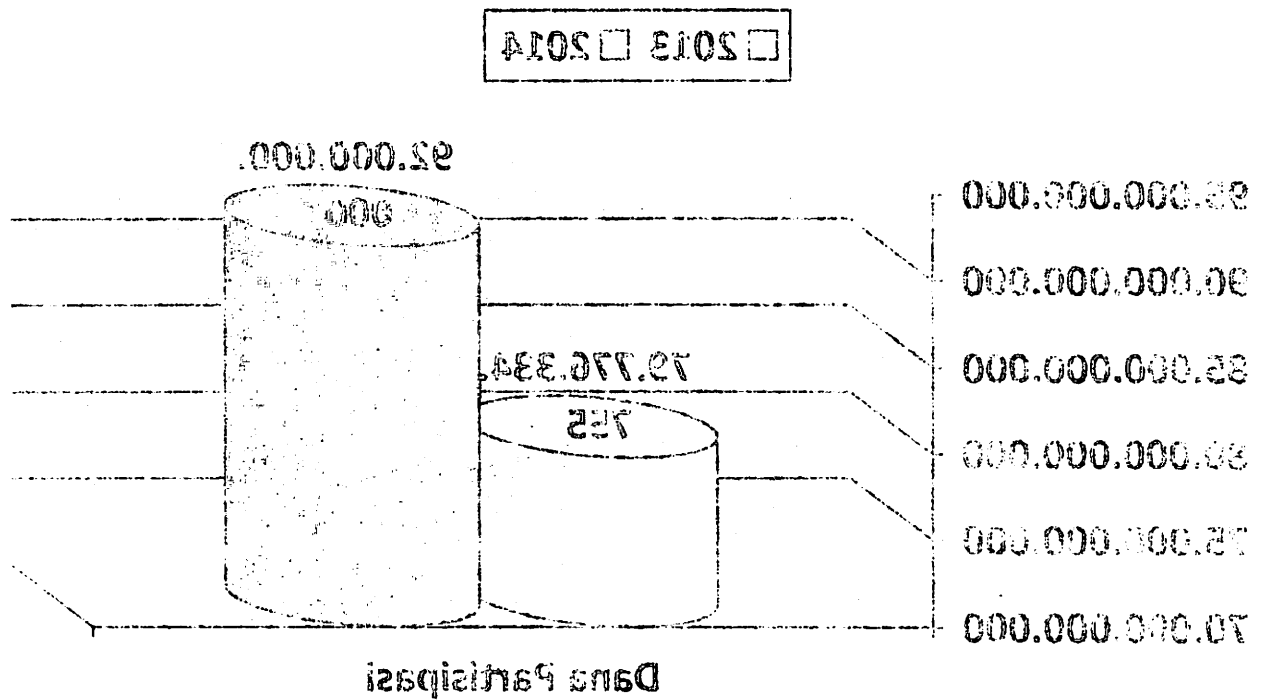
Hasil Pencapaian yang tercantum dalam tabel diatas untuk dana partisipasi masyarakat dalam pembangunan realisasinya masih dalam taraf prediksi mengingat tahun 2014 data yang masuk dari kelurahan ke BPMPPKB sebanyak 6 (enam) Kelurahan , jadi hasil pencapaian dari sasaran tingkat peran serta Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dengan indikator kinerja yg didukung dengan program menunjukan hasil yang baik , terlebih partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga tinggi, yang mana apabila kita lihat dari tahun ke tahun jumlah dana swadaya yang terhimpun dari masyarakat dalam menunjang pembangunan di lingkungannya semakin meningkat.



Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2014	Pencapaian 2014
100	Indikator Kinerja Jumlah Mahasiswa KKN	170	373
113,33	Jumlah dana Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	29.776.334,732	92.000.000,000
111,11	Prosentase Kelayakan yang memenuhi profil	90%	100%

Hasil Pencapaian yang tercantum dalam tabel diatas untuk data partisipasi masyarakat dalam pembangunan realisasinya masih dalam target prediksi mengingat tahun 2014 data yang masuk dari kelurahan ke BKM PKB sebanyak 6 (enam) Kelurahan , jadi hasil pencapaian dari sasaran tingkat peran serta Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dengan indikator kinerja yg didukung dengan program menunjukkan hasil yang baik , terlihat partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga tinggi yang mana apabila kita lihat dari tahun ke tahun jumlah dana swadaya yang terkumpul dari masyarakat dalam menunjang pembangunan di lingkungannya semakin meningkat.



5. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan yang operasionalnya didukung kegiatan - kegiatan :

- Pembinaan Tehnologi tepat guna

Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

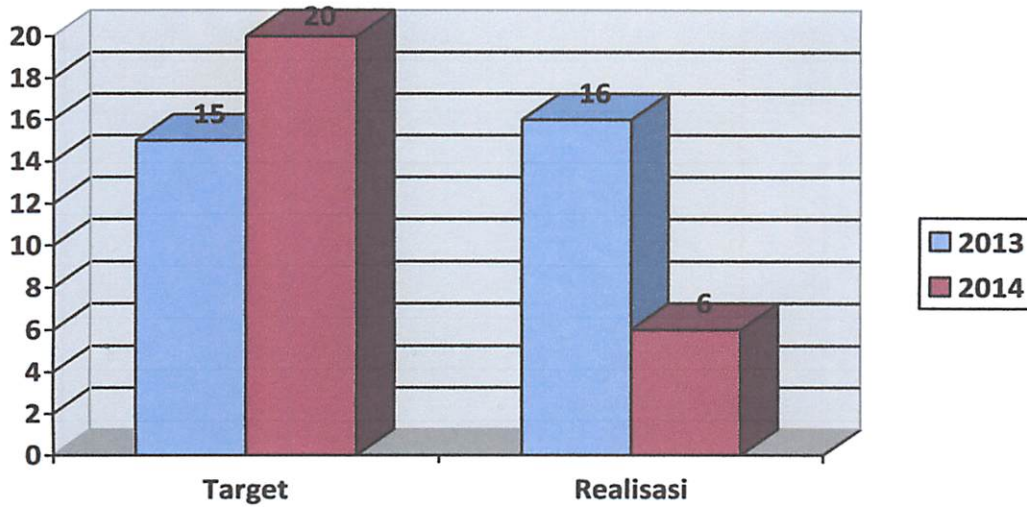
Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	%
Meningkatnya peman Faatan Tehnologi tepat guna	Jumlah hasil karya cipta tehnologi tepaguna	20	6	30
	Jumlah Posyantek yang terbentuk	5	6	120
	Jumlah Warung Teknologi Yang terbentuk	10	0	0

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa keinginan masyarakat dalam penciptaan tehnologi tepat guna masih sangat rendah jadi perlu adanya pembinaan yang lebih intens dan adanya dukungan dari Lintas terkait untuk mendukung kegiatan serta adanya pembelajaran tentang karya cipta tehnologi dan wadah yaitu terbentuknya warung tehnologi sehingga hasilnya terwadahi lebih baik dan meningkat.

5. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan yang operasionalnya didukung kegiatan - kegiatan :
- Peminatan Teknologi tepat guna
- Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET 2014	Realisasi 2014	%
Meningkatnya peran Lembaga Teknologi tepat Guna	Jumlah hasil karya cipta teknologi tepat guna	30	6	30
	Jumlah Posanlek yang terbentuk	5	6	120
	Jumlah Waring Teknologi Yang terbentuk	10	0	0

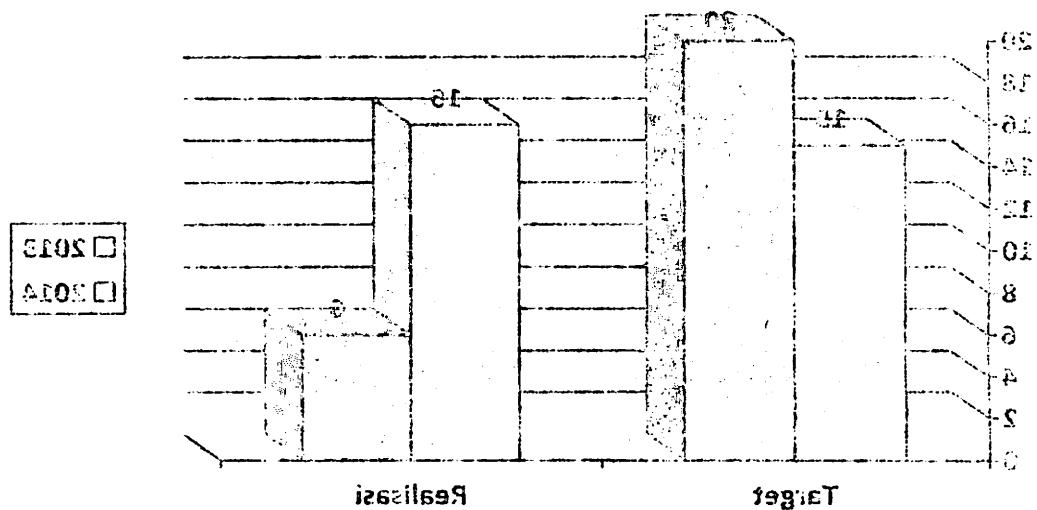
- Dari tabel di atas menunjukkan bahwa keinginan masyarakat dalam pembuatan teknologi tepat guna masih sangat rendah jadi perlu adanya pembinaan yang lebih intens dan adanya dukungan dari lintas terkait untuk mendukung kegiatan serta adanya pembelajaran tentang karya cipta teknologi dan wadah yaitu terbentuknya waring teknologi sehingga hasilnya terwadahi lebih baik dan meningkat.



6. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan
 Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan dalam program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita yang operasionalnya didukung dalam kegiatan :
- Pemberdayaan Posyandu:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	%
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas	251.837	232.089	92,16
	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	6400	3568	55,75
	Jumlah Kader PKK Aktif	16.364	4793	29,30
	Jumlah Kader Posyandu	1412	5217	369,47

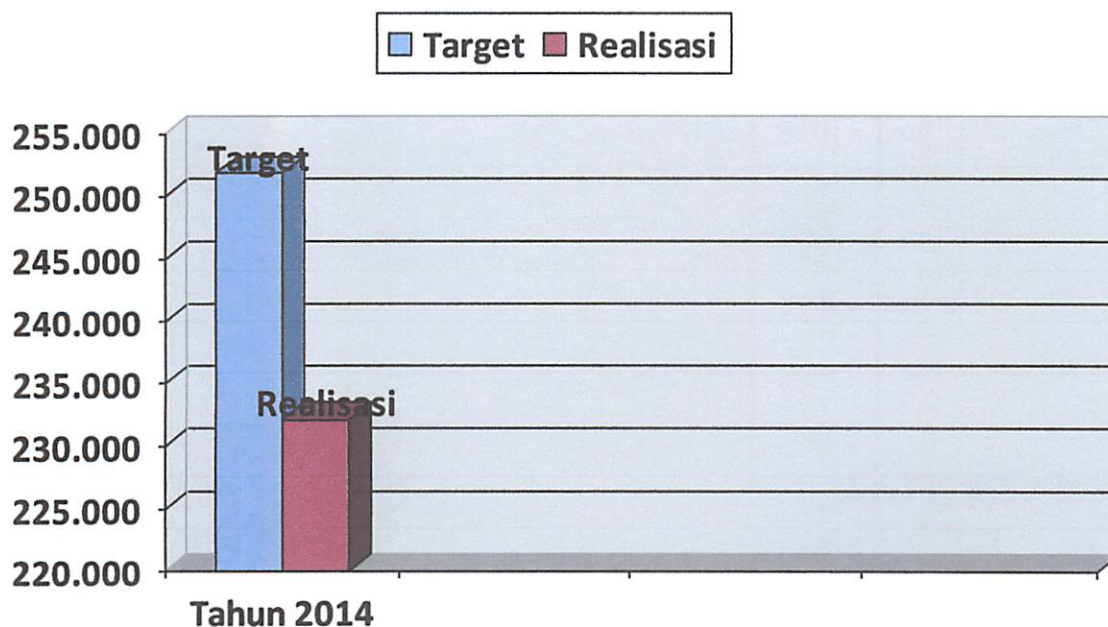
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil pencapaian belum memadai dengan target yang ditentukan untuk itu perlu menggalakan serta mengikutsertakan peran serta perempuan di berbagai bidang untuk menyetarakan gender .



6. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan
 Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan dalam program Peningkatan Pelayan
 Kesehatan anak balita yang operasionalnya didukung dalam kegiatan :
 - Peningkatan Poyandu

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	%
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas	2518,77	222,086	92,16
	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	6400	3868	52,32
	Jumlah Kader PKK Aktif	16364	4293	20,30
	Jumlah Kader Poyandu	1412	3217	229,47

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil pencapaian belum memadai dengan target yang ditentukan untuk itu perlu menggalakan serta meningkatkan peran serta perempuan di berbagai bidang untuk menyetarakan gender.



7. Meningkatnya Kesadaran Hukum Kaum Perempuan

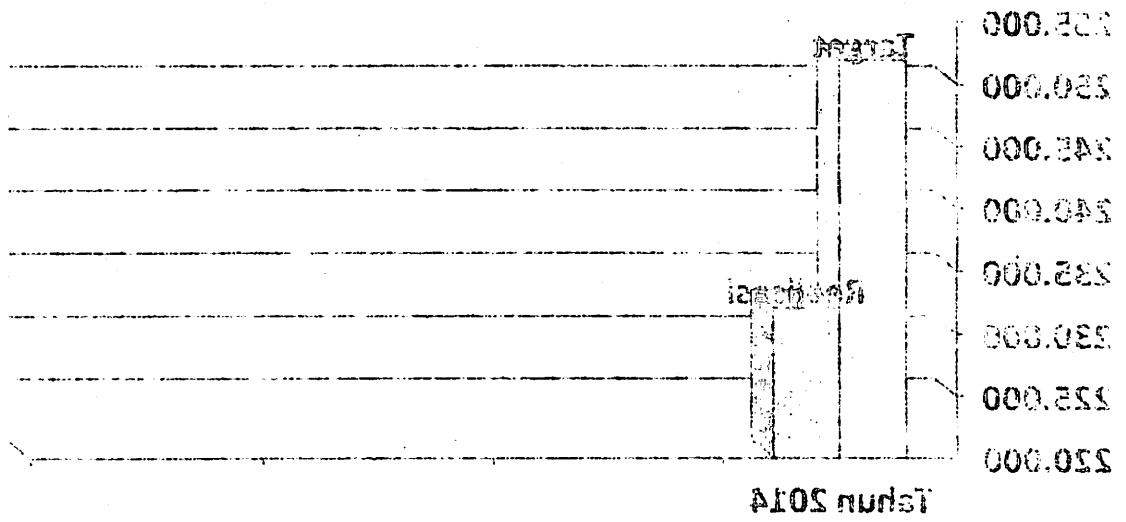
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan beberapa program yaitu :

- a. Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak yang operasionalnya didukung dengan kegiatan - kegiatan :
 - Pembinaan peran Perempuan dan Anak
 - Pembentukan Pokja PUG dan PTPPO
- b. Peningkatan Peran serta dan gender dalam Pembangunan
 - Fasilitas kegiatan - kegiatan dalam rangka memperingati hari Ibu dan Hari Kartini

Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	%
Meningkatnya kesadaran hukum kaum perempuan	Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	1	1	100
	Terbentuknya Kader Damping PKDRT	27	34	91.89
	Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dan tindak kekerasan	100	100	100

□ Target □ Realisasi



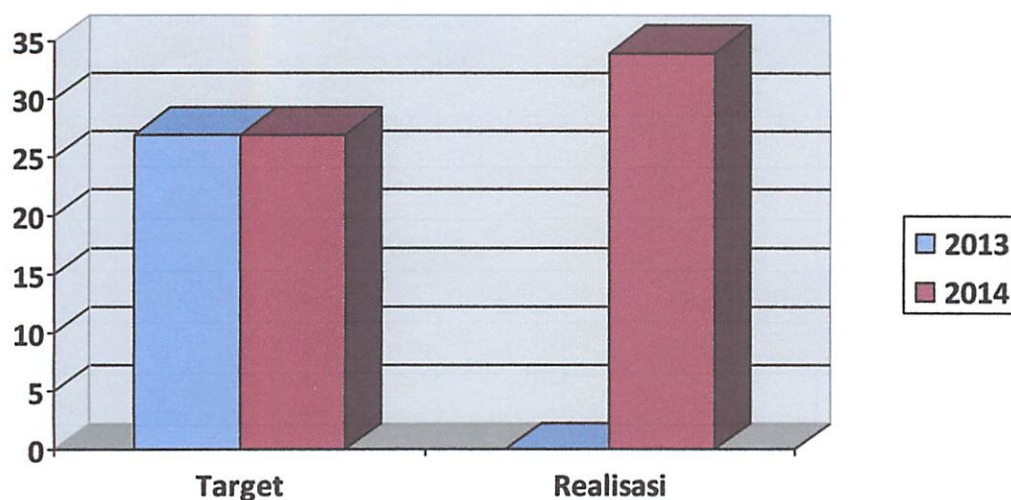
7. Meningkatkan Kesadaran Hukum kaum Perempuan
- Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan beberapa program yaitu :
- Program Penguatan kelembagaan pemerintahan gender dan anak yang operasionalnya didukung dengan kegiatan - kegiatan :
 - Pembinaan peran Perempuan dan Anak
 - Pembentukan Pokja PUG dan PTPO
 - b. Peningkatan Peran serta dan gender dalam Pembangunan
 - Fasilitas kegiatan - kegiatan dalam rangka memperingati hari Ibu dan Hari Kartini
- Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	%
Meningkatnya kesadaran hukum kaum perempuan	Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Pemurban dan Anak (P2PTPA)	1	1	100
	Terbentuknya Kader Damping PKDR	27	27	91,89
	Realisasi penyediaan peng- dan peningkatan perempuan dan anak dan tindak kekerasan	100	100	100

	Menurunnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga	67	67	126,67
	Angka kekerasan dan eksploitasi anak di bawah umur	1	1	100

Dari tabel yang tercantum dapat disimpulkan bahwa makin tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga maka makin banyak pula tingkat pengaduan masyarakat hal ini menunjukkan tingkat pengetahuan dalam bidang hukum yang semakin tinggi maka semakin tinggi dalam memperjuangkan untuk memperoleh - haknya.

untuk mengatasi agar penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan tindak kekerasan terhadap anak dengan baik maka harus ada keseimbangan kader pendamping serta terbentuknya P2TP2A dengan pelayanan yang prima sehingga setiap ada pengaduan dapat terselesaikan dengan baik.



Grafik. Kader Damping PKDRT

8. Meningkatnya kesadaran masyarakat perlindungan anak

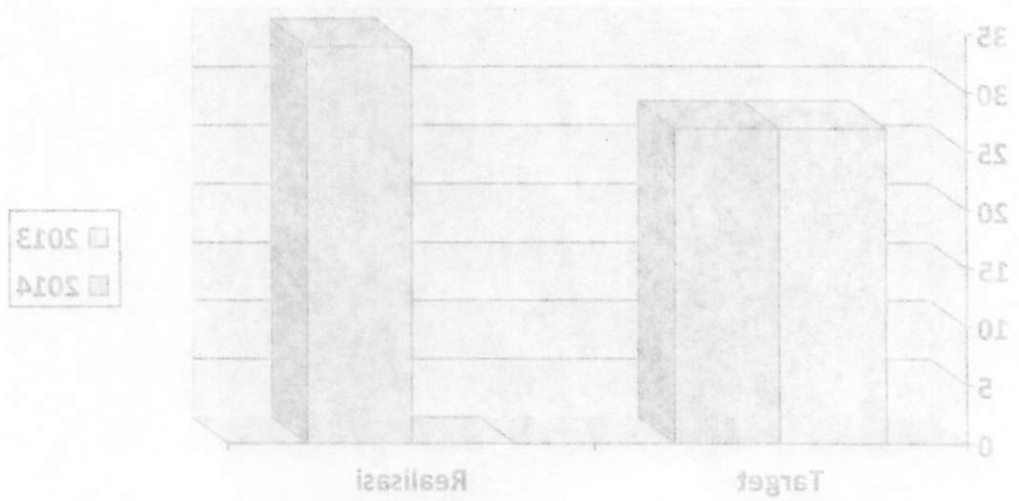
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak yang operasionalnya berupa kegiatan - kegiatan :

- a. Fasilitasi Pengembangan Kota Layak Anak.
- b. Pembinaan peran Perempuan dan Anak.

Menurunnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga	67	67	126,67
Angka kekerasan dan eksploitasi anak di bawah umur	1	1	100

Dari tabel yang tercantum dapat disimpulkan bahwa makin tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga maka makin banyak pula tingkat pengaduan masyarakat hal ini menunjukkan tingkat pengetahuan dalam bidang hukum yang semakin tinggi maka semakin tinggi dalam memperjuangkan untuk memperoleh - haknya.

Untuk mengatasi agar penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan tindak kekerasan terhadap anak dengan baik maka harus ada keseimbangan kader pendamping serta terbentuknya P2TP2A dengan belayanan yang prima sehingga setiap ada pengaduan dapat terselesaikan dengan baik.



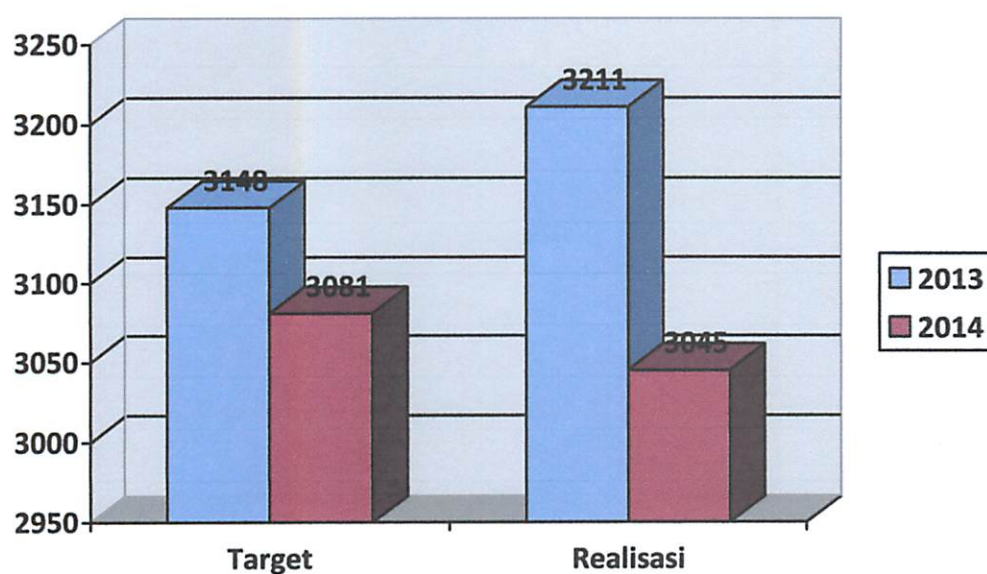
Grafik. Kader Damping PKDR

8. Meningkatkan kesadaran masyarakat perlindungan anak
- Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan program penguatan kelembagaan pemerintahan gender dan anak yang operasionalnya berupa kegiatan - kegiatan :
- Fasilitasi Pengembangan Kota Layak Anak.
 - Pembinaan peran Perempuan dan Anak.

Adapun pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	%
Menurunnya Tingkat Kekerasan dan Eksploitasi Anak di Bawah Umur	Terbentuknya Forum Anak Tingkat Kota	1	1	100
	Terbentuknya forum Anak Tingkat Kecamatan	7	6	85.71
	Terbentuknya Taman Cerdas	2	1	50
	Cakupan anak sekolah penerima program PMT - AS	3081	3045	98.83

Dari tabel yang tercantum dapat disimpulkan bahwa ketersediaan fasilitas dalam pengembangan potensi anak belum cukup karena sarana dan prasarana untuk kegiatan masih kurang yaitu terbentuknya taman cerdas masih 50 % untuk itu perlu adanya kebijakan agar dapat meningkatkan pengembangan potensi diri dengan penambahan taman cerdas yang ada di masing -masing kecamatan.



9. Meningkatnya Kualitas sumber daya Manusia (pegawai)

Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan program untuk meningkatkan kinerja penyuluh KB dengan meningkatkan kinerja SDM aparatur yang operasinalnya berupa kegiatan - kegiatan :

- a. Pentaloka penyuluh KB Tingkat Kota
- b. Penilaian angka kredit.
- c. Pengadaan pemakaian dinas beserta perlengkapannya.

10. Terselenggaranya layanan Administrasi perkantoran

Untuk meningkatkan kualitas layanan masyarakat yang operasionalnya berupa kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

- Pelayanan administrasi perkantoran
- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sementara itu, dari aspek keuangan dapat dilihat realisasi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program sebagai berikut :

NO	Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%
		2014	2014	
1	3	4	5	6
1	Meningkatkan Perekonomian Keluarga	1.290445.000,-	1.159.149.530,-	89,83
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat	1.090.310.000,-	952.154.000,-	87,54
	Dalam program KB			
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	1.394.146.700,-	1.151.601.260,-	82,60
4	Meningkatnya peran serta lembaga ke-Masyarakatan dalam pembangunan	3.493.747.200,-	3.085.474.679,-	90,92
5	Meningkatnya Pemanfaatan teknologi tepat guna	175.000.000,-	160.884.520,-	91,93
6	Meningkatnya peran serta dalam pembangunan	167.325.000,-	132.191.200,-	79,00
7	Meningkatnya kesadaran hukum Kaum perempuan	316.025.000,-	441.446.500,-	98,74
8	Meningkatnya kesadaran masyarakat Perlindungan anak	310.825.000,-	153.074.535,-	49,25
9	Meningkatnya kualitas SDM (pegawai)	165.175.000,-	132.022.495,-	79,93
10	Terselenggaranya layanan administrasi	1.591.364.900,-	1.245.456.816	78,26
	Jumlah	9.994.363.800,-	8.532.616.185,-	85,37

A. PENGINGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sementara itu, dari aspek keuangan dapat dilihat realisasi pelaksanaan anggaran dalam pelaksanaan program sebagai berikut :

NO	Uraian	Target Anggaran		Realisasi Anggaran
		2014	2013	
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Perkonomian Keluarga	1.390.445.000,-	1.159.149.530,-	83,33
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat Dalam program KB	1.090.310.000,-	923.154.000,-	84,64
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	1.394.149.700,-	1.151.601.390,-	82,69
4	Meningkatnya peran serta lembaga ke- masakatan dalam pembangunan	3.463.747.200,-	2.082.474.679,-	60,15
5	Meningkatnya pemanfaatan teknologi peta guna	175.000.000,-	160.884.530,-	91,93
6	Meningkatnya peran serta dalam pembangunan	197.825.000,-	132.191.300,-	66,80
7	Meningkatnya kesadaran hukum Kamui perempuan	319.025.000,-	441.149.500,-	138,24
8	Meningkatnya kesadaran masyarakat Perilaku anak	310.825.000,-	153.074.325,-	49,25
9	Meningkatnya kualitas SDM (pegawai)	192.175.000,-	132.022.492,-	68,69
10	Terselenggaranya layanan administrasi	1.291.394.900,-	1.212.459.819,-	93,86
Jumlah		9.994.393.800,-	8.232.919.182,-	82,32

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Dengan melihat dari pengukuran kinerja yang telah dilakukan, pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tahun 2014, tentang pencapaian kesertaan ber KB masyarakat telah tercapai, yang mencerminkan telah adanya kesadaran masyarakat dalam merencanakan keluarganya.
2. Rendahnya frekuensi penyuluhan KIE tentang kesehatan reproduksi bagi remaja dibandingkan dengan jumlah kelompok yang dibentuk dalam suatu wadah yaitu (PIK) Pusat Informasi dan Konseling remaja yang ada.
3. Dengan pencapaian dana swadaya masyarakat dalam kegiatan gotong royong masyarakat, mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah lingkungan sekitarnya.
4. Dengan bertambahnya pengaduan kasus - kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, menunjukkan semakin dipahaminya hak - hak perempuan dan anak dan dapat diselesaikan dengan baik.

B. SARAN

Namun demikian, dengan kondisi kota Balikpapan dan kemajuan teknologi terutama teknologi komunikasi yang berkembang dengan pesat, sehingga banyak pendatang masuk serta bergesernya nilai- nilai kehidupan dalam masyarakat merupakan permasalahan atau tantangan yang harus dapat dihadapi.

Langkah - langkah yang diambil untuk mengantisipasi adalah :

1. Melakukan pembinaan yang intensif kepada peserta KB agar tetap terjaga kelestariannya
2. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan kepada generasi muda tentang masalah kesehatan reproduksi.

3. Menjalin dan menjaga kerjasama dengan mitra kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan di semua lini dan tingkatan.
4. Melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) dan perlindungan anak.

Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) yang telah tersusun ini berguna sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan program terhadap masyarakat.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA
(B P M P K B)

Jl. MT. HARYONO Rt.26 NOMOR 186 KELURAHAN SUNGAINANGKA, KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN,
KOTA BALIKPAPAN

Website : <http://bpmppkb.balikpapan.go.id> Email : bpmppkb@balikpapan.go.id

Telp. dan Fax : (0542) 424808, 8810561, 8810562 (fax reception) : (0542) 8810560 Kode Pos 76114

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 188-46- 15 / BPMPPKB-SKT

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2011 – 2016**

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan yang termuat dalam RENSTRA Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016, maka ditetapkan sasaran strategis badan yang akan dicapai secara jelas dan sistematis untuk dapat mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahunnya .
 - b. bahwa untuk keakuratan pengukuran kinerja, diperlukan tolok ukur berupa indikator – indikator kinerja utama yang sesuai dengan pencapaian sasaran.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan indikator – indikator kinerja utama di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- Mengingat** :
- 1. UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
 - 2. UU No.7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAH DAERAH
 PERKAMPUNAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR : 100/2011/KEP/BAPEMAB-KOT

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEMERINTAH DAERAH PERKAMPUNAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2011 – 2016
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAH DAERAH PERKAMPUNAN
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BALIKPAPAN

- Mengingat :
- a. bahwa demi tercapainya pencapaian visi dan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Perkampunan dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan yang termuat dalam RENSTRA Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Perkampunan dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016, maka ditetapkan sasaran strategis badan yang akan dicapai secara jelas dan sistematis untuk dapat mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahunnya ;
 - b. bahwa untuk keakuratan pengukuran kinerja, diperlukan tolak ukur berupa indikator – indikator utama yang sesuai dengan pencapaian sasaran ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan indikator – indikator kinerja utama di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Perkampunan dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan ;
- Mengingat :
1. UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ;
 2. UU No.7 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Koperasi Kemitraan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ;

3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
4. Peraturan Pemerintah No 271 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera
5. Peraturan pemerintah No 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan perkembangan kependudukan.
6. Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No 32 Tahun 2004.
7. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
9. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
10. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
11. Provinsi Dan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah.
14. Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
15. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Keperindustrian dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
4. Peraturan Pemerintah No 271 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera
5. Peraturan pemerintah No 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan perkembangan keperindustrian.
6. Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No 22 Tahun 2004.
7. UU No. 29 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
10. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah.
14. Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Urutan Tugas Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
15. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011 - 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011 – 2016.

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja utama Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016 adalah dokumen perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2011 – 2016 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2011 – 2016.
- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Meningkatnya perekonomian Keluarga	1. Meningkatnya Partisipasi Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 Alasan Ekonomi dalam POKTAN UPPKS : a. Jumlah anggota UPPKS yang terlatih b. Terbina dan terlatihnya institusi Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan & pemberdayaan keluarga c. Jumlah produk UPPKS yang terjual d. Jumlah Pengurus AKU yang terlatih	BPMPPKB

2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program KB	<p>1. Terpenuhiya kebutuhan Masyarakat dalam ber-KB :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya prevalensi Rate PA / PUS b. Meningkatnya jumlah peserta KB Baru c. Menurunnya jumlah PUS yang Ingin ber-KB yang tidak terlayani (unmet need) d. Peningkatan cakupan peran pria dalam ber-KB e. Meningkatnya Prevalensi PA (Gakin) / PUS f. Peningkatan kemandirian ber-KB g. Peningkatnya cakupan Pelayanan kontrasepsi /pengendalian lapangan h. Bertambahnya Jumlah RT, Kelurahan dan Kecamatan yg memiliki data mikro Keluarga i. cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat dalam ber-KB j. Meningkatnya jumlah peserta KB yang terayomi : - Implant - IUD - Tingkat kelestarian Ber-KB - 10 Tahun - 15 Tahun - 20 Tahun k. Meningkatnya jumlah KB Persalinan / Keguguran <p>2. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya Jumlah Kelompok PIK Remaja 	BPMPPKB
---	--	--	---------

3	<p>Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> b. Meningkatnya partisipasi remaja dalam kegiatan PIK kegiatan PIK c. Frekuensi Penyuluhan / remaja terpapar informasi KB dan Kesehatan Reproduksi <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kelompok kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya rasio kelompok Bina keluarga Balita (BKB) per RT b. Meningkatnya cakupan Anggota BKB ber-KB 70 % c. Meningkatnya jumlah kelompok BKB yang memiliki APE d. Meningkatnya prosentase BKB percontohan 2. Pembinaan Institusi Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yg ber KB 87 % b. Meningkatnya rasio pembantu pembina KB Desa (PPKBD) 1 petugas per Kelurahan c. Meningkatnya rasio petugas lapangan KB /penyuluh KB (PLKB/PKB) petugas kelurahan d. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat pengelola program KB Aktif e. Meningkatnya jumlah pemenang tingkat Propinsi untuk lomba institusi masyarakat f. Meningkatnya jumlah pemenang tingkat Nasional untuk lomba institusi masyarakat 	BPMPPKB
---	--	--	---------

4	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan cakupan peran serta masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan peran serta institusi perguruan tinggi dalam pembangunan daerah b. Meningkatkan cakupan kelurahan yang menyusun profil 	BPMPPKB
5	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tingkat kreatifitas masyarakat dalam pengembangan TTG : <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan jumlah hasil karya cipta tehnologi tepat guna b. Meningkatkan jumlah Posyantek yang terbentuk c. Meningkatkan jumlah Warung tehnologi yang terbentuk 	BPMPPKB
6	Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya Angka melek Huruf perempuan usia 15 tahun keatas 2. Angka Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan 3. Meningkatkan jumlah kader PKK aktif 4. Meningkatkan jumlah kader posyandu 	BPMPPKB
7	Meningkatnya kesadaran hukum kaum perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya rumusan kebijakan Perlindungan Perempuan dan anak terhadap KDRT, Trafficking,dll. 2. Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan PUG dan anak 3. Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 	BPMPPKB

<p>31711113</p>	<p>1. Mengetahui dan memahami konsep dasar serta aspek-aspek lain tentang awabaja 2. Mengetahui peran serta institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan daerah b. Mengetahui dan memahami peran serta institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan daerah</p>	<p>Mengetahui dan memahami konsep dasar serta aspek-aspek lain tentang awabaja</p>	<p>1</p>
<p>31711113</p>	<p>1. Mengetahui dan memahami konsep dasar serta aspek-aspek lain tentang awabaja 2. Mengetahui peran serta institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan daerah a. Mengetahui dan memahami peran serta institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan daerah b. Mengetahui dan memahami peran serta institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan daerah c. Mengetahui dan memahami peran serta institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan daerah d. Mengetahui dan memahami peran serta institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan daerah</p>	<p>Mengetahui dan memahami konsep dasar serta aspek-aspek lain tentang awabaja</p>	<p>2</p>
<p>31711113</p>	<p>1. Mengetahui dan memahami konsep dasar serta aspek-aspek lain tentang awabaja 2. Mengetahui peran serta institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan daerah 3. Mengetahui dan memahami peran serta institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan daerah 4. Mengetahui dan memahami peran serta institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan daerah</p>	<p>Mengetahui dan memahami konsep dasar serta aspek-aspek lain tentang awabaja</p>	<p>3</p>
<p>31711113</p>	<p>1. Mengetahui dan memahami konsep dasar serta aspek-aspek lain tentang awabaja 2. Mengetahui peran serta institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan daerah 3. Mengetahui dan memahami peran serta institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan daerah 4. Mengetahui dan memahami peran serta institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan daerah 5. Mengetahui dan memahami peran serta institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan daerah 6. Mengetahui dan memahami peran serta institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan daerah 7. Mengetahui dan memahami peran serta institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan daerah 8. Mengetahui dan memahami peran serta institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan daerah 9. Mengetahui dan memahami peran serta institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan daerah 10. Mengetahui dan memahami peran serta institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan daerah</p>	<p>Mengetahui dan memahami konsep dasar serta aspek-aspek lain tentang awabaja</p>	<p>4</p>

8	Meningkatnya kesadaran masyarakat perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> 4. Terbentuknya Kader Damping PKDRT 5. Realisasinya penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan 1. Terbentuknya Forum Anak Tingkat Kota 2. Terbentuknya Forum Anak Tingkat Kecamatan 3. Terbentuknya Taman Cerdas 4. Cakupan anak sekolah penerima program PMT-AS 	BPMPPKB
9	Meningkatnya kualitas SDM (pegawai)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kinerja Penyuluh KB 2. Meningkatnya kinerja SDM aparatur 	BPMPPKB
10	Terselenggaranya layanan administrasi perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas layanan masyarakat 	BPMPPKB

BIRKBEK	<p>1. Töbötөлөгү Казакстан Республикасы</p> <p>2. Төбөтөлөгү Кыргызстан Республикасы</p> <p>3. Төбөтөлөгү Кыргызстан Республикасынын Билим, Маданият жана Спорт Министрлиги</p> <p>4. Төбөтөлөгү Кыргызстан Республикасынын Билим, Маданият жана Спорт Министрлиги</p>	<p>Алматы</p> <p>Биринчи Май району</p> <p>Төбөтөлөгү</p>	8
BIRKBEK	<p>1. Төбөтөлөгү Кыргызстан Республикасынын Билим, Маданият жана Спорт Министрлиги</p> <p>2. Төбөтөлөгү Кыргызстан Республикасынын Билим, Маданият жана Спорт Министрлиги</p> <p>3. Төбөтөлөгү Кыргызстан Республикасынын Билим, Маданият жана Спорт Министрлиги</p> <p>4. Төбөтөлөгү Кыргызстан Республикасынын Билим, Маданият жана Спорт Министрлиги</p>	<p>Алматы</p> <p>Төбөтөлөгү</p>	8
BIRKBEK	<p>1. Төбөтөлөгү Кыргызстан Республикасынын Билим, Маданият жана Спорт Министрлиги</p>	<p>Алматы</p> <p>Төбөтөлөгү</p>	8

Pasal 2

Unit Kerja di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016 yang diatur dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : Februari 2014

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana

Kota Balikpapan



Sri Wahjuningsih

Pembina TK I

NIP. 19670625 199303 2 009

Pasal 2

Tim Kerja di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Pemuda dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan dalam melaksanakan program kegiatan dan indikator kinerja wajib mengacu pada indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RTS/RA)

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Pemuda dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan tahun 2011 - 2016 yang dalam dalam surat keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : Februari 2014

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Pemuda dan Keluarga Berencana



PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan
: 2014

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian
1	Meningkatnya perekonomian keluarga	1. Meningkatnya Partisipasi Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 Alasan Ekonomi dalam POKTAN UPPKS :			
		a. Jumlah anggota UPPKS yang terlatih	150 Orang	120	80%
		b. Terbina dan terlatihnya institusi masy dalam meningkatkan kesejahteraan & pemberdayaan keluarga	175 Orang	135	77,14%
		c. Jumlah produk UPPKS yang terjual	20 KLP	25	125%
		d. Jumlah Pengurus AKU yang terlatih	15 Orang	4	26,00%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program KB	1. Terpenuhinya kebutuhan Masyarakat dalam ber-KB :			
		a. Meningkatnya prevalensi Rate PA / PUS	75,00%	76,35%	76,35%
		b. Meningkatnya jumlah peserta KB Baru	18.700	8853	47,34%
		c. Menurunnya jumlah PUS yang ingin ber-KB yang tidak terlayani (unmet need)	10,099	11,871	11,75%
		d. Peningkatan cakupan peran pria dalam ber-KB	3,67 %	2,19%	60%
		e. Meningkatnya Prevalensi PA (Gakin) / PUS	552	1134	20543%
		f. Peningkatan kemandirian ber-KB	53,279	50716	95,19%
		g. Meningkatnya cakupan pelayanan kontrasepsi/pengendalian lapangan	255	113	44%
		h. Bertambahnya Jumlah RT, Kelurahan dan Kecamatan yg memiliki data mikro Keluarga	34 Kelurahan	34	100%
		i. cakupan penyediaan alat dan Obat obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat dalam ber-KB	12,85 %	27,01%	210%
		j. Meningkatnya jumlah peserta KB yang terayomi : Implant	1031	476	
		IUD	1.932	1863	
		- Tingkat kelestarian Ber-KB			
		'- 10 Tahun	10,977	12350	
		'- 15 Tahun	4724	5921	
		'- 20 Tahun	725	891	
		. Meningkatnya jumlah pelayanan KB Persalinan / Keguguran	1 Paket	,-	
		2. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja			
		a. Meningkatnya Jumlah Kelompok PIK Remaja	25 KLP	35 klp	
		b. Meningkatnya partisipasi remaja dalam kegiatan PIK	25%	25%	100%
		c. Frekuensi Penyuluhan / remaja terpapar informasi KB dan Kesehatan Reproduksi	15	10	

NO.	SASARAN STRATEGIS (SESUAI RENSTRA SKPD 2011-2016)	INDIKATOR KINERJA (SESUAI RENSTRA SKPD 2011-2016)	TARGET 2014 (sesuai Renstra SKPD)	Realisasi 2014	Capaian
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	1. Cakupan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kelompok kegiatan : a. Meningkatnya rasio kelompok Bina keluarga Balita (BKB) per RT b. Meningkatnya cakupan anggota BKB ber-KB 70 % c. Meningkatnya jumlah kelompok BKB yang memiliki APE d. Meningkatnya prosentase BKB percontohan 2. Pembinaan Institusi Masyarakat : a. Meningkatnya cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yg ber KB 87 % b. Meningkatnya rasio pembantu pembina KB Desa (PPKBD) 1 petugas per Kelurahan c. Meningkatnya rasio petugas lapangan KB /penyuluh KB (PLKB/PKB) petugas kelurahan d. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat pengelola program KB Aktif d. Meningkatnya jumlah pemenang tingkat Propinsi untuk lomba institusi masyarakat e. Meningkatnya jumlah pemenang tingkat Nasional untuk lomba institusi masyarakat	55 klp 1960 Klj 38 Klp 6 Klp 1,675 34 41 orang 1,447 7 4	51 1496 51 6 573 34 26 2246 8 1	92,73% 76,33% 134,21% 100% 34,21% 100% 76,47% 155% 114% 25%
4	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	1. Meningkatnya cakupan peran serta masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan : a. Meningkatnya peran serta institusi perguruan tinggi dalam pembangunan daerah b. Meningkatnya cakupan kelurahan yang menyusun profil	170 mahasiswa 90%	272 100%	160% 111,11%
5	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	1. Meningkatnya tingkat kreatifitas masyarakat dalam pengembangan TTG : a. Meningkatnya jumlah hasil karya cipta teknologi tepat guna b. Meningkatnya jumlah Posyantek yang terbentuk c. Meningkatnya jumlah Warung teknologi yang terbentuk	20 jenis 5 Kelompok 10 Kelompok	6 6 0	30% 120% 0%

NO.	SASARAN STRATEGIS (SESUAI RENSTRA SKPD 2011-2016)	INDIKATOR KINERJA (SESUAI RENSTRA SKPD 2011-2016)	TARGET 2014 (sesuai Renstra SKPD)	Realisasi 2014	Capaian
6	Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam pembangunan	1. Menurunnya Angka melek Huruf perempuan usia 15 tahun keatas	62%	232,089	92,16%
		2. Angka Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan	54,82	4168	65,12%
		3. Meningkatnya jumlah kader PKK aktif	16364 kader	4793	29,30%
		4. Meningkatnya jumlah kader posyandu	1412 kader	5217	369,47%
7	Meningkatnya kesadaran hukum kaum perempuan	1. Tersedianya rumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak terhadap KDRT, Trafficking, dll.			
		2. Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan PUG dan anak	1 Paket	0	0%
		3. Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	1 Paket	1	100%
		4. Terbentuknya Kader Damping PKDRT	37	34	91,89%
		5. Realisasinya penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100%	100%	10000%
8	Meningkatnya kesadaran masyarakat perlindungan anak	1. Terbentuknya Forum Anak Tingkat Kota	1	1	100%
		2. Terbentuknya Forum Anak Tingkat Kecamatan	7	6	86%
		3. Terbentuknya Taman Cerdas	2	1	50%
		4. Cakupan anak sekolah penerima program PMT-AS	3,081	3045	98,83%
9	Meningkatnya kualitas SDM (pegawai)	1. Meningkatnya kinerja Penyuluh KB	1 paket	1 pkt	63%
		2. Meningkatnya kinerja SDM aparatur	1 paket	1 pkt	76,47%
10	Terselenggaranya layanan administrasi perkantoran	1. Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	1 Paket	1 pkt	85,37%

NO	KETERANGAN (KEMENTERIAN KESEHATAN DAN KELUARGA)	TAHUN	REKAPITULASI (2011-2013)	REKAPITULASI (2011-2013)	REKAPITULASI (2011-2013)
10	Perencanaan dan pelaksanaan	1 bln	3212	3212	3212
9	Perencanaan dan pelaksanaan	1 bln	1000	1000	1000
8	1. Menetapkan kebijakan 2. Menetapkan kebijakan 3. Menetapkan kebijakan	1 bln 1 bln 1 bln	1000 1000 1000	1000 1000 1000	1000 1000 1000
7	1. Menetapkan kebijakan 2. Menetapkan kebijakan 3. Menetapkan kebijakan 4. Menetapkan kebijakan	1 bln 1 bln 1 bln 1 bln	1000 1000 1000 1000	1000 1000 1000 1000	1000 1000 1000 1000
6	1. Menetapkan kebijakan 2. Menetapkan kebijakan 3. Menetapkan kebijakan 4. Menetapkan kebijakan 5. Menetapkan kebijakan	1 bln 1 bln 1 bln 1 bln 1 bln	1000 1000 1000 1000 1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000 1000 1000 1000 1000
5	1. Menetapkan kebijakan 2. Menetapkan kebijakan 3. Menetapkan kebijakan 4. Menetapkan kebijakan 5. Menetapkan kebijakan	1 bln 1 bln 1 bln 1 bln 1 bln	1000 1000 1000 1000 1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000 1000 1000 1000 1000
4	1. Menetapkan kebijakan 2. Menetapkan kebijakan 3. Menetapkan kebijakan 4. Menetapkan kebijakan 5. Menetapkan kebijakan	1 bln 1 bln 1 bln 1 bln 1 bln	1000 1000 1000 1000 1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000 1000 1000 1000 1000
3	1. Menetapkan kebijakan 2. Menetapkan kebijakan 3. Menetapkan kebijakan 4. Menetapkan kebijakan 5. Menetapkan kebijakan	1 bln 1 bln 1 bln 1 bln 1 bln	1000 1000 1000 1000 1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000 1000 1000 1000 1000
2	1. Menetapkan kebijakan 2. Menetapkan kebijakan 3. Menetapkan kebijakan 4. Menetapkan kebijakan 5. Menetapkan kebijakan	1 bln 1 bln 1 bln 1 bln 1 bln	1000 1000 1000 1000 1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000 1000 1000 1000 1000
1	1. Menetapkan kebijakan 2. Menetapkan kebijakan 3. Menetapkan kebijakan 4. Menetapkan kebijakan 5. Menetapkan kebijakan	1 bln 1 bln 1 bln 1 bln 1 bln	1000 1000 1000 1000 1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000 1000 1000 1000 1000